



PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN GROBOGAN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-03 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Grobogan, 5 Februari 2025



**KEPALA DP3AKB  
KABUPATEN GROBOGAN**

*[Signature]*

**INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680429 199001 2 001

## DAFTAR ISI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR                              | i   |
| DAFTAR ISI                                  | ii  |
| BAB I PENDAHULUAN                           | 1   |
| A. Latar Belakang                           | 1   |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja       | 2   |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah           | 5   |
| D. Landasan Hukum                           | 6   |
| E. Sistematika                              | 7   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                  | 9   |
| A. Rencana Strategis                        | 9   |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2024               | 25  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024            | 27  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA               | 38  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi               | 40  |
| B. Realisasi Anggaran                       | 94  |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 98  |
| BAB IV PENUTUP                              | 101 |
| LAMPIRAN                                    | 104 |
| SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA        | 107 |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA DP3AKB            | 104 |

# **BAB I PENDAHULUAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, DP3AKB mempunyai tugas pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DP3AKB mempunyai fungsi :

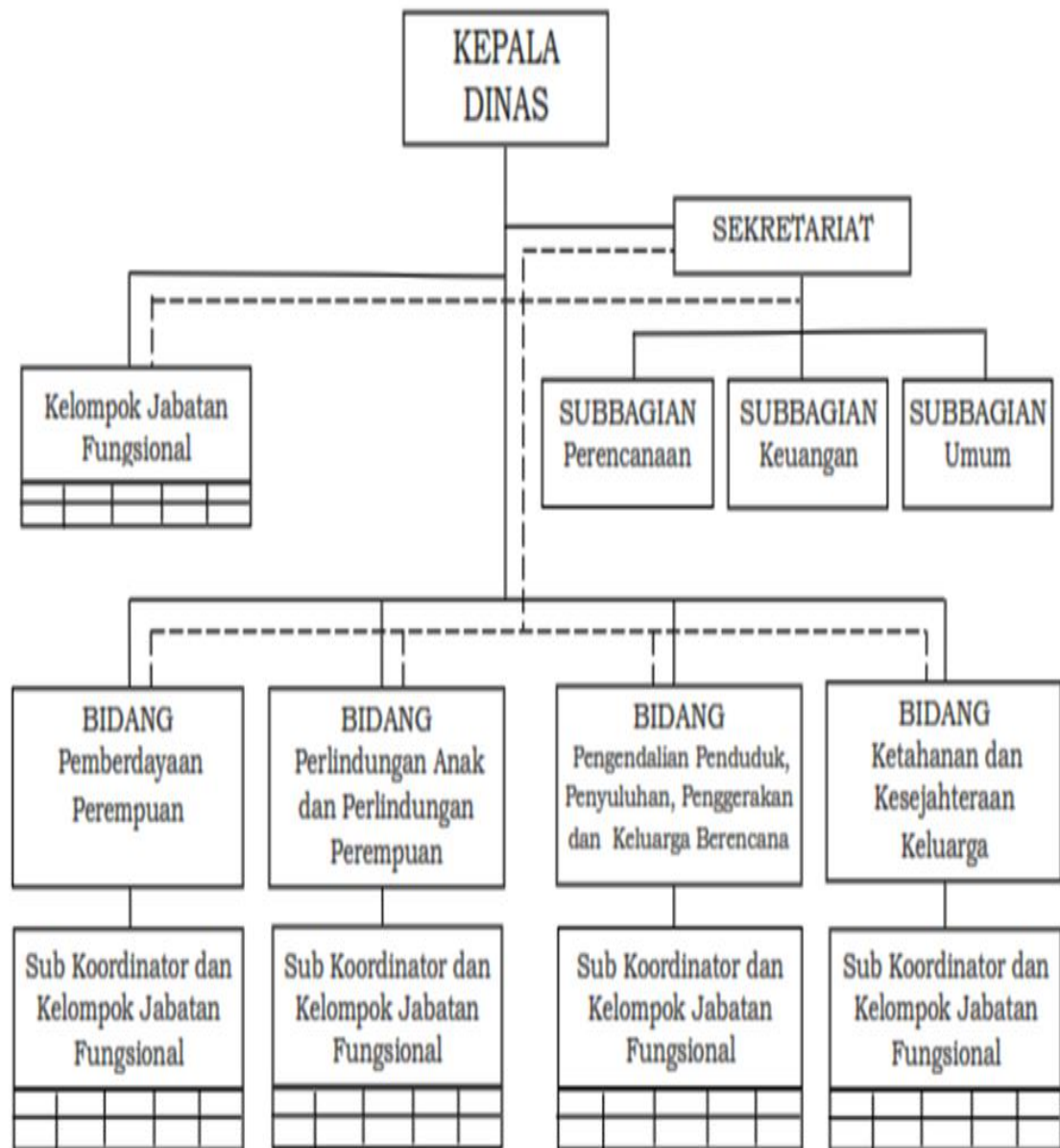
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG, dan pemenuhan hak anak;
2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Tingginya kawin anak;
4. Belum optimalnya keberdayaan perempuan;
5. Rendahnya pencapaian akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) yang terdiri dari : MOP/MOW, IUD dan Implant. Sejumlah 66.898 akseptor sampai dengan tahun 2023 atau 13.87% dari seluruh peserta/akseptor KB di Kabupaten Grobogan, yakni 482.165 akseptor.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola dan pelayanan publik.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu strategisnya adalah masih rendahnya kesetaraan gender dan tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu strategisnya adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

#### **D. Landasan Hukum.**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan ini disusun berdasar-kan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

#### **E. Sistematika.**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV          PENUTUP**

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis.**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

## 2. Misi.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :



Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana.

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara

Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam

Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

dan Misi ke-4, yaitu :

**Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas**

**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**DP3AKB Kabupaten Grobogan**

| NO  | TUJUAN                                                                                  | SASARAN |                                                  | INDIKATOR KINERJA                                        | TARGET KINERJA PADA TAHUN |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                         |         |                                                  |                                                          | 2022                      | 2024   | 2024   | 2025   | 2026   |
| (1) | (2)                                                                                     | (3)     |                                                  | (4)                                                      | (5)                       | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |
| 1   | Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga |         |                                                  | PUG                                                      | 0,95                      | 0,96   | 0,97   | 0,98   | 0,99   |
|     |                                                                                         | 1.1     | Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan | Capaian Level APE                                        | Mad ya                    | Mad ya | Mad ya | Mad ya | Mad ya |
|     |                                                                                         |         |                                                  | Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG | 80                        | 82     | 84     | 84     | 84     |

| NO  | TUJUAN                                     | SASARAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET KINERJA PADA TAHUN |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                            |         |                                                                  |                                                       | 2022                      | 2024   | 2024   | 2025   | 2026   |
| (1) | (2)                                        | (3)     |                                                                  | (4)                                                   | (5)                       | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |
|     |                                            |         |                                                                  | Persentase Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah | 51,2                      | 51,4   | 51,6   | 51,7   | 52     |
|     |                                            | 1.2     | Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak | Persentase Perkawinan dibawah umur 19 tahun           | 0,070                     | 0,069  | 0,067  | 0,064  | 0,061  |
|     |                                            |         |                                                                  | Tingkat capaian KLA/Indek PUHA                        | Mad ya                    | Mad ya | Mad ya | Mad ya | Mad ya |
|     |                                            |         |                                                                  | Persentase Korban yang dilayani sesuai standart       | 100                       | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2   | Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk |         |                                                                  | Total Fertility Rate (TFR)                            | 2,28                      | 2,25   | 2,20   | 2,18   | 2,16   |
|     |                                            | 2.1     | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana         | ASFR 15-19                                            | 13                        | 19,2   | 18,8   | 18,4   | 18     |
|     |                                            |         |                                                                  | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                      | 23                        | 23,5   | 24     | 24,5   | 25     |

|   |                                                                                        |     |                                                                                                                                                        |                                                                             |             |             |             |             |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |                                                                                        |     |                                                                                                                                                        | Unmet Need                                                                  | 10,84       | 10,44       | 10,10       | 9,81        | 9,50         |
|   |                                                                                        | 2.2 | Meningkatnya Keberdayaan Kelompok dalam Pembangunan Keluarga                                                                                           | Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif (BKB;BKR;BKL;U PPKS) | 82          | 83          | 84          | 85          | 86           |
|   |                                                                                        |     |                                                                                                                                                        | Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera                                 | 32,5        | 32          | 31,5        | 31          | 30,5         |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. |     |                                                                                                                                                        | Nilai Evaluasi SKIP PD                                                      | B<br>(65)   | B<br>(68)   | BB<br>(70)  | BB<br>(72)  | BB<br>(73,5) |
|   |                                                                                        |     |                                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                         | B<br>(76,7) | B<br>(77,2) | B<br>(77,7) | B<br>(78,2) | B<br>(79,7)  |
|   |                                                                                        | 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik. | Nilai SAKIP OPD                                                             | B<br>(65)   | B<br>(68)   | BB<br>(70)  | BB<br>(72)  | BB<br>(73,5) |

|  |  |  |  |               |             |             |             |             |             |
|--|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |  | Nilai IKM OPD | B<br>(76,7) | B<br>(77,2) | B<br>(77,7) | B<br>(78,2) | B<br>(79,7) |
|--|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

*Sumber : Renstra DP3AKB periode 2021-2026*

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama DP3AKB Kabupaten Grobogan**

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA |                                             | SATUAN   | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |             |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                  |                   |                                             |          | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN                                       | SUMBER DATA |
| 1. | Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan | 1.1.              | Capaian Level APE                           | Predikat | <p><b>Definisi :</b></p> <p>Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Propinsi / Kab / Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.</p> | Laporan hasil Tim Penilai                                          | Kemen PPPA  |
|    |                                                  | 1.2.              | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pening- | %        | <p><b>Definisi :</b></p> <p>Lembaga Penyedia Layanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\sum$ Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang | Bidang PP   |



|   |                                         |     |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                        |
|---|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   |                                         |     | katan Kualitas Keluarga yang Aktif dlm Mewujudkan Kesenjangan Gender |   | Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. | aktif dalam mewujudkan Kesenjangan Gender.<br>$\frac{\text{Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$ |                        |
|   |                                         | 1.3 | Kontribusi Perempuan dilembaga pemerintah                            | % | <b>Definisi :</b><br>Peran perempuan dalam lembaga pemerintah<br><b>Tujuan :</b><br>Untuk mengukur keberhasilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan.                                          | $\frac{\text{Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah}} \times 100$           | Bidang PP              |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan | 2.1 | Persentase perkawinan dibawah umur 19                                | % | <b>Definisi:</b><br>Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan                                                                                                                                            | $\frac{\text{Jumlah Perkawinan di bawah umur 19 tahun}}{\text{Jumlah Perkawinan}} \times 100$                                                                 | Bidang PP&PA / Kemenag |





|  |                          |     |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
|--|--------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Perlindungan Khusus Anak |     | tahun.                          |      | oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.<br><br><i>Tujuan :</i><br><br>Untuk memberikan perlindungan atas hak – hak bagi korban kekerasan thd perempuan dan anak.                                                                                                             | Σ Seluruh perkawinan      |            |
|  |                          | 2.2 | Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA | Skor | <i>Definisi:</i><br><br>Variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.<br><br><i>Tujuan :</i><br><br>- Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan<br><br>- Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam | Laporan hasil Tim Penilai | Kemen PPPA |



|   |                                       |     |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |
|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                                       |     |                                                            |       | menyelenggarakan KLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |              |
|   |                                       | 2.3 | Persentase Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standart. | %     | <p><b>Difinisi:</b></p> <p>Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Untuk memberikan perlindungan atas hak - hak bagi korban kekerasan thd perempuan dan anak.</p> | $\frac{\sum \text{Korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani sesuai standar.}}{\sum \text{Kekerasan terhadap Perempuan.}} \times 100$ | Bidang PP&PA |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | 3.1 | ASFR 15-19                                                 | Angka | <p><b>Difinisi :</b></p> <p>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{\sum \text{Kelahiran pada kelompok umur 15-19 th.}}{\text{---}} \times 1.000$                                                         | Bidang P4KB  |



|  |                    |     |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |             |
|--|--------------------|-----|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Keluarga Berencana |     |                                  |   | <p>Rate/ASFR 15-19) adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada satu periode per 1000 penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama.</p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>Analisis hasil perhitungan untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun).</p> | $\sum$ Perempuan pd kelompok umur 15-19 th.                                        |             |
|  |                    | 3.2 | Persentase Peserta KB Aktif MKJP | % | <p><i>Difinisi :</i></p> <p>Peserta KB aktif MKJP adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi, yang terdiri dari MOW, MOP, IUD, atau implant, tanpa diselingi kehamilan.</p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>Untuk mengukur tingkat kesertaan ber-KB dari seluruh Pasangan Usia</p>                                                                      | $\frac{\sum \text{Peserta KB Aktif MKJP}}{\sum \text{Peserta KB MKJP}} \times 100$ | Bidang P4KB |



|   |                                                               |     |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |                                                               |     |                                                                      |   | Subur (PUS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                   |
|   |                                                               | 3.3 | Unmet Need                                                           | % | <p><b>Difinisi :</b></p> <p>Unmet Need adalah <b>kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi</b>, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Indikator ini dapat membantu dalam upaya pengendalian PUS yang tidak ber-KB tetapi berpotensi terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta mengetahui peluang terhadap tingginya angka kematian ibu, akibat kehamilan yang tidak diinginkan</p> | $\frac{\sum \text{PUS yang Ingin Ber-KB tapi Tidak Mendapat Akses.}}{\sum \text{PUS yang Ingin Ber-KB}} \times 100$ | Bidang P4KB       |
| 4 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga. | 4.1 | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif ( BKB,BKR,BKL | % | <p><b>Difinisi :</b></p> <p>Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{\sum \text{Anggota Poktan Aktif}}{\sum \text{Seluruh anggota Poktan.}} \times 100$                           | Bidang KKK DP3AKB |



|  |  |     |                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                      |
|--|--|-----|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |     | dan UPPKS)                                  |   | <p>proses pendidikan dan informasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk individu yang sehat, harmonis, dan berkualitas.</p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>Indikator ini menunjukkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pengembangan SDM Masyarakat</p> |                                                                                                                            |                      |
|  |  | 4.2 | Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera | % | <p><i>Definisi :</i></p> <p>Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.</p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>Untuk mengetahui perkembangan</p>                                                                                                       | $\frac{\sum \text{Keluarga Pra Sejahtera tingkat Kabupaten.}}{\sum \text{Seluruh Keluarga Tingkat Kabupaten.}} \times 100$ | Bidang KKK<br>DP3AKB |



|   |                                                                                                                                                       |     |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                                                                                                                                                       |     |                         |      | tahapan keluarga pra sejahtera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | 5.1 | Nilai evaluasi SAKIP PD | Skor | <p><b>Definisi :</b></p> <p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Ta.2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan</p> | Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | Sekretariat DP3AKB |



|  |  |     |                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--|--|-----|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |     |                                                   |      | anggaran dalam rangka Terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|  |  | 5.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Skor | <p><b>Difinisi :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya..</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> | Metode pengolahan Nilai IKM berpedoman pada cara menghitung nilai IKM sesuai PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. | Sekretariat DP3AKB |

Sumber : Indikator Kinerja Utama DP3AKB Tahun 2024



## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024 DP3AKB Kabupaten Grobogan**

| NO  | TUJUAN                                                                                  | SASARAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                        | SAT.  | TARGET                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)     |                                                                  | (4)                                                      | (5)   | (6)                   |
| 1   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga |         |                                                                  | PUG                                                      | Angka | 0,97                  |
|     |                                                                                         | 1.1     | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan                 | Capaian Level APE                                        | Level | Madya (0.6375-0.7724) |
|     |                                                                                         |         |                                                                  | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG | %     | 84                    |
|     |                                                                                         |         |                                                                  | Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah                | %     | 60                    |
|     |                                                                                         | 1.2     | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun               | %     | 0.05                  |





|   |                                                                                       |     |                                                                                      |                                                                                                   |       |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Level | Madya (618.10) |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | %     | 100            |
| 2 | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk                                            |     |                                                                                      | TFR                                                                                               | Angka | 2.19           |
|   |                                                                                       | 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                             | ASFR 15-19                                                                                        | %     | 18.80          |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Persentase Peserta KB Aktip MKJP                                                                  | %     | 24.50          |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Unmet Need                                                                                        | %     | 9.50           |
|   |                                                                                       | 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                         | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif                                            | %     | 84             |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                       | %     | 31.50          |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas |     |                                                                                      | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | Skor  | BB (70)        |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                 | Skor  | B (77.70)      |
|   |                                                                                       | 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | Skor  | BB (70)        |
|   |                                                                                       |     |                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                 | Skor  | B (77.70)      |



|  |  |                                                                                 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | dengan<br>manajemen<br>administrasi<br>perkantoran<br>pemerintahan<br>yang baik |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Sumber : Rencana Kerja DP3AKB Kabupaten Grobogan tahun 2024

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal Empat bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

| Tujuan                                                                                          | Sasaran                                                                                                                                               | Indikator                                                                                         | Target                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 2024                  |
| <b>Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;</b> |                                                                                                                                                       | <b>PUG</b>                                                                                        | <b>0,97</b>           |
|                                                                                                 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Capaian Level APE                                                                                 | Madya (0.6375-0.7724) |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 84%                   |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 60%                   |
|                                                                                                 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0.05%                 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya (618.10)        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%                  |
| <b>Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk</b>                                               | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | TFR                                                                                               | 2.19                  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | ASFR 15 - 19                                                                                      | 18.80%                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                                                                  | 24.50%                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                                        | 9.50%                 |
|                                                                                                 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif ( BKB,BKR,BKL dan UPPKS )                  | 84%                   |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                       | 31.50%                |
| <b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b>    |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                       |
|                                                                                                 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB (70)               |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                 | B (77,70)             |

Sumber : Perjanjian Kinerja DP3AKB Tahun 2024



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan DP3AKB Tahun 2024**

| NO.      | PROGRAM/ KEGIATAN                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET | ANGGARAN      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1        | 2                                                                               | 3                                                                     | 4      | 5             |
| <b>A</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN<br/>/KOTA</b> | Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik           | 100%   | 4.343.251.000 |
|          |                                                                                 | Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah  | 100%   | 2.229.098.600 |
|          |                                                                                 | Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko                         | 100%   | 3.450.000     |
| a.1      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah.       | 100%   | 3.450.000     |
| a.2      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB | 100%   | 4.343.251.000 |
| a.3      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | 100%   | 6.400.000     |
| a.4      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Terselenggaranya Administrasi Umum di SKPD                            | 100%   | 766.482.900   |
| a.5      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah                  | 100%   | 120.911.700   |
| a.6      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia    | 100%   | 835.308.000   |



|          |                                                                                                                            |                                                                                                                        |             |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| a.7      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Terpeliharanya Barang miliki daerah                                                                         | 100%        | 499.996.000        |
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                           | <b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender</b> | <b>84 %</b> | <b>540.917.600</b> |
| b.1      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender                                               | 84%         | 63.000.000         |
| b.2      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG                                                                      | 80%         | 338.603.200        |
| b.3      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG                                                                        | 80%         | 139.314.400        |
| <b>C</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                               | <b>Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban</b>               | <b>100%</b> | <b>60.000.000</b>  |
| c.1      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak                                      | 100%        | 60.000.000         |
| <b>D</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                     | <b>Persentase Data Pilah Gender yang tersedia</b>                                                                      | <b>100%</b> | <b>37.000.000</b>  |
| d.1      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat                      | Persentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender                                                                     | 100%        | 37.000.000         |



|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |              |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|     | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |              |                    |
| E   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                             | <b>Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA</b>                                                                                                         | <b>Madya</b> | <b>267.866.500</b> |
| e.1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | Persentase Lembaga yang aktif dalam PHA                                                                                                          | 78%          | 267.866.500        |
| F   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                | <b>Persentase menurunnya angka kelahiran</b>                                                                                                     | <b>23</b>    | <b>514.404.200</b> |
| f.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Tersusunnya dokumen Grandesign                                                                                                                   |              | 10.000.000         |
| f.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB                                                                                  |              | 504.404.200        |
| G   | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                    | <b>Cakupan peserta KB aktif</b>                                                                                                                  | <b>78 %</b>  |                    |
| g.1 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                             | Persentase kualitas pelaksanaan program KB                                                                                                       | 25%          | 1.803.341.900      |
| g.2 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB)                                                                                     | Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam POKTAN                                                                                             | 80%          | 1.040.995.000      |
| g.3 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 84 %         |                    |
| g.4 | Pemberdayaan dan Peningkatan                                                                                                                        | <b>Persentase peran organisasi</b>                                                                                                               | <b>85 %</b>  |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |             |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|     | Peran serta Organisasi<br>Kemasyarakatan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam<br>Pelaksanaan Pelayanan dan<br>Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                           | kemasyarakatan dalam<br>pembangunan keluarga                                  |             |                      |
| H   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br/>DAN PENINGKATAN<br/>KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                          | <b>Cakupan PUS peserta KB<br/>Anggota Poktan ( BKB, BKR,<br/>BKL,PPPKS ).</b> | <b>87 %</b> | <b>1.431.931.592</b> |
| h.1 | Pelaksanaan Pembangunan<br>Keluarga melalui Pembinaan<br>Ketahanan dan Kesejahteraan<br>Keluarga                                                                                                     | Cakupan pengetahuan tentang<br>pengolahan pangan                              | 80 %        | 2.470.000            |
| h.2 | Pelaksanaan dan Peningkatan<br>Peran Serta Organisasi<br>Kemasyarakatan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/ Kota dalam<br>Pembangunan Keluarga Melalui<br>Pembinaan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga | Persentase peran organisasi<br>kemasyarakatan dalam<br>pembangunan keluarga   | 21.5        | 1.429.461.592        |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja tahun 2024, Reviu dilakukan karena telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.



Perjanjian Kinerja Reviu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

| Tujuan                                                                                  | Sasaran                                                                                                                                               | Indikator                                                                        | Target                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                  | Penetapan             | Perubahan             |
| Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga |                                                                                                                                                       | PUG                                                                              | 0,97                  | 0,97                  |
|                                                                                         | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Capaian Level APE                                                                | Madya (0,6375-0,7724) | Madya (0,6375-0,7724) |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                         | 84%                   | 84%                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                         | 60%                   | 60%                   |
|                                                                                         | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                      | 0,05%                 | 0,05%                 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                  | Madya (618,10)        | Madya (618,10)        |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Jumlah korban yang dilayani sesuai standard                                      | 100%                  | 100%                  |
| Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk                                              | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | TFR (Total Fertility Rate)                                                       | 2,19                  | 2,19                  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | ASFR 15 - 19                                                                     | 18,80%                | 18,80%                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktip MKJP                                                 | 24,50%                | 24,50%                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                       | 9,50                  | 9,50                  |
|                                                                                         | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif ( BKB,BKR,BKL dan UPPKS ) | 84%                   | 84%                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan kelurga Pra Sejahtera                                       | 31,50%                | 31,50%                |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas   | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                          | BB (70)               | BB (70)               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                | B (77,70)             | B (77,70)             |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja DP3AKB Tahun 2024





Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Perubahan Program dan Kegiatan DP3AKB Tahun 2024

| No.   | Program/ Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                              | Target       |               | Anggaran Stlh Perubahan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                             |                                                                                                | Satuan       | Kinerja       |                         |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                                                                                              | 4            | 5             | 6                       |
| A     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>                                                         | Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik                                    | %            | 100.00        | 4,459,339,000           |
|       |                                                                                                                             | Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah                           | %            | 100.00        | 2,267,300,800           |
|       |                                                                                                                             | Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko                                                  | %            | 100.00        | 3,450,000               |
| A.1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                     | <b>Tepenuhinya kebutuhan rutin penunangan kinerja perangkat daerah.</b>                        | <b>%</b>     | <b>100.00</b> | <b>3,450,000</b>        |
| A.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | Dokumen      | 2.00          | 3,450,000               |
| A.2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                               | <b>Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB</b>                   | <b>%</b>     | <b>100.00</b> | <b>4,459,339,000</b>    |
| A.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                              | orang/ bulan | 14.00         | 4,459,339,000           |
| A.3   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                       | <b>%</b>     | <b>100.00</b> | <b>6,400,000</b>        |
| A.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Laporan      | 5.00          | 6,400,000               |
| A.4   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                   | <b>Terselenggaranya Administrasi Umum di SKPD</b>                                              | <b>%</b>     | <b>100.00</b> | <b>776,399,200</b>      |
| A.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | Paket        | 8.00          | 23,173,000              |
| A.4.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | Paket        | 6.00          | 193,463,000             |
| A.4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | Paket        | 1.00          | 56,240,200              |
| A.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | Dokumen      | 2.00          | 8,400,000               |
| A.4.5 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | Paket        | 1.00          | 56,341,000              |
| A.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Laporan      | 10.00         | 438,782,000             |
| A.5   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                     | <b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah</b>                                    | <b>%</b>     | <b>100.00</b> | <b>141,464,200</b>      |
| A.5.1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit         | 12.00         | 141,464,200             |



|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |            |               |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| A.6   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                        | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>                                                                                                               | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>774,677,300</b> |
| A.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                           | Laporan    | 10.00         | 6,960,000          |
| A.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                  | Laporan    | 10.00         | 153,637,000        |
| A.6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                    | Laporan    | 10.00         | 614,080,300        |
| A.7   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>Persentase Terpeliharanya Barang miliki daerah</b>                                                                                                                                   | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>568,360,100</b> |
| A.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                  | Unit       | 1.00          | 89,959,000         |
| A.7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                  | Unit       | 2.00          | 179,063,100        |
| A.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                | Unit       | 2.00          | 234,114,000        |
| A.7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                          | Unit       | 73.00         | 65,224,000         |
| B.    | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                   | <b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender</b>                                                                  | <b>%</b>   | <b>84.00</b>  | <b>591,588,200</b> |
| B.1   | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender</b>                                                                                                         | <b>%</b>   | <b>84.00</b>  | <b>92,321,200</b>  |
| B.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun                                                                                  | Dokumen    | 1.00          | 92,321,200         |
| B.2   | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG</b>                                                                                                                                | <b>%</b>   | <b>80.00</b>  | <b>338,603,200</b> |
| B.2.1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Dokumen    | 1.00          | -                  |
| B.2.2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                       | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Organisasi | 3.00          | 338,603,200        |
| B.3   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                        | <b>Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG</b>                                                                                                                                  | <b>%</b>   | <b>80.00</b>  | <b>160,663,800</b> |
| B.3.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                | Lembaga    | 1.00          | 70,000,000         |
| B.3.2 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | Dokumen    | 1.00          | 90,663,800         |
| C.    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                       | <b>Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban</b>                                                                                | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>92,101,000</b>  |
| C.1   | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>                                                                                                | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>92,101,000</b>  |
| C.1.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Lembaga    | 1.00          | -                  |
| C.1.2 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Laporan    | 1.00          | 92,101,000         |
| D.    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                             | <b>Persentase Data Pilah Gender yang tersedia</b>                                                                                                                                       | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>37,000,000</b>  |
| D.1   | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender</b>                                                                                                                               | <b>%</b>   | <b>100.00</b> | <b>37,000,000</b>  |
| D.1.1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                        | Dokumen    | 1             | 37,000,000         |



|       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| F.    | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                           | <b>Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Nilai</b>          | <b>Madya</b>       | <b>296,892,700</b>        |
| F.1   | <b><i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>                                                   | <b><i>Persentase Lembaga yang aktif dalam PHA</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>%</b>              | <b>78.00</b>       | <b>296,892,700</b>        |
| F.1.1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha                             | Organisasi            | 1                  | 296,892,700               |
| H.    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                              | <b>Menurunnya angka kelahiran</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b>              | <b>23.00</b>       | <b>514,404,200</b>        |
| H.1   | <b><i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i></b> | <b><i>Tersusunnya dokumen Grandesign</i></b>                                                                                                                                                                                           | <b><i>dokumen</i></b> | <b><i>1.00</i></b> | <b><i>10,000,000</i></b>  |
| H.1.1 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Dokumen               | 1.00               | 10,000,000                |
| H.2   | <b><i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i></b>                                                                              | <b><i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</i></b>                                                                                                                                                          | <b><i>Laporan</i></b> | <b><i>4.00</i></b> | <b><i>504,404,200</i></b> |
| H.2.2 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                          | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                                | Laporan               | 1.00               | 279,600,000               |
| H.2.3 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                              | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                    | Dokumen               | 1.00               | 224,804,200               |
| I.    | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                  | <b>Cakupan peserta KB aktif</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>%</b>              | <b>78.00</b>       | <b>5,673,352,100</b>      |
| I.1   | <b><i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i></b>                             | <b><i>Persentase kualitas pelaksanaan program KB</i></b>                                                                                                                                                                               | <b>%</b>              | <b>26</b>          | <b>1,803,341,900</b>      |
| I.1.1 | Advokasi Program KBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja                                                                                                          | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                    | Organisasi            | 10.00              | 199,888,000               |
| I.1.2 | Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                      | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                     | Dokumen               | 1                  | 184,900,000               |
| I.1.3 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok                                                                            | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan               | 10                 | 286,710,000               |
| I.1.4 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | Laporan               | 10                 | 966,036,000               |
| I.1.5 | Pengendalian Program KBPK                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK                                                                                                                                                                                         | Laporan               | 1                  | 165,807,900               |



PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN

|       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| I.2   | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB)</b>                                                                                                                                             | <b>Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam POKTAN</b>                                                                                                                                                                       | <b>%</b>   | <b>80.00</b> | <b>1,040,995,000</b>  |
| I.2.1 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                              | Jumlah kader yang mengikuti pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                  | orang      | 280.00       | 840,000,000           |
| I.2.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKP/PLKB)                                 | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKP/PLKB)                            | Laporan    | 1.00         | 200,995,000           |
| I.3   | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                | <b>Persentase kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                           | <b>%</b>   | <b>84</b>    | <b>1,813,665,200</b>  |
| I.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                  | Laporan    | 93           | 80,700,000            |
| I.3.2 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                         | Orang      | 4,034        | 1,723,965,200         |
| I.3.4 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                     | Laporan    | 3            | 9,000,000             |
| I.4.  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                                 | <b>Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga</b>                                                                                                                                                      | <b>%</b>   | <b>85</b>    | <b>1,015,350,000</b>  |
| I.4.2 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                                                                            | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                                                                    | Kampung    | 64           | 1,010,200,000         |
| I.4.3 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                            | Dokumen    | 1            | 5,150,000             |
| J.    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                                                | <b>Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan ( BKB, BKR, BKL, PPPKS ).</b>                                                                                                                                                            | <b>%</b>   | <b>87</b>    | <b>7,678,792,000</b>  |
| J.1   | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                                     | <b>Cakupan pengetahuan tentang pengolahan pangan</b>                                                                                                                                                                              | <b>%</b>   | <b>80</b>    | <b>339,340,000</b>    |
| J.1.1 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                      | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                   | Unit       | 25           | 300,000,000           |
| J.1.2 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                          | Laporan    | 2            | 19,580,000            |
| J.1.3 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                   | Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                             | Laporan    | 16           | 19,760,000            |
| J.2   | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                          | <b>Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga</b>                                                                                                                                                      | <b>%</b>   | <b>21.50</b> | <b>7,339,452,000</b>  |
| J.2.1 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Laporan    | 1            | 263,760,000           |
| J.2.2 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                             | Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                            | Laporan    | 10           | 3,360,000,000         |
| J.2.3 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                                              | Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                                              | Laporan    | 10           | 3,696,000,000         |
| J.2.4 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Organisasi | 1            | 19,692,000            |
|       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | <b>21,614,220,000</b> |

Sumber : DPPA DP3AKB Tahun 2024

# **BAB III**

## **AKUNTABILĪTAS KINERJA**





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.





Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode        |
|----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | $91 \leq 100$       | Hijau Tua   |
| 2  | Tinggi                | $76 \leq 90$        | Hijau Muda  |
| 3  | Sedang                | $66 \leq 75$        | Kuning Tua  |
| 4  | Rendah                | $51 \leq 65$        | Kuning Muda |
| 5  | Sangat Rendah         | $\leq 50$           | Merah       |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi





keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama DP3AKB Tahun 2024

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 | Target  | Realisasi | Capaian % | Kategori /Kode | Sumber Data |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;                                                              | PUG                                                                                               | 0.97    | 9.09      | 937.11%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Level APE                                                                                         | Madya   | Madya     | 100%      | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 84%     | 85,71%    | 102.04%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 60%     | 61,72%    | 102.87%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0,0505% | 0.01802   | 165%      | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/ Indeks PUHA                                                                  | Madya   | Madya     | 100%      | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%    | 100%      | 100%      | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 2   | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk                                                                                                            | TFR                                                                                               | 2.19    | 2.00      | 108.68%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | ASFR 15-19                                                                                        | 18.8    | 7.57      | 159.73    | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                                                                  | 24.5    | 24.85     | 101.43    | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                                        | 9.5     | 9.22      | 102.95    | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif                                            | 84%     | 84.27%    | 100.32%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                       | 31.50%  | 31.13%    | 101.17%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 3   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                                                 | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB(70)  | BB (75)   | 107.14%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B(77.7) | B (77,78) | 100.10%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
| 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB(70)  | BB (75)   | 107.14%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B(77.7) | B (77,78) | 100.10%   | Sangat Tinggi  | Dp3akb      |

Sc : Data olah DP3AKB Grobogan



Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraian sebagai berikut :

**I. Tujuan 1 :**

**Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga.**

Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga diukur dengan satu (1) indikator, indikator tersebut adalah **Indeks Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)**. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung Jumlah Organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan Gender dibagi Jumlah seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah OPD yang melaksanakan kebijakan PUG dalam pembangunan.

PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan. PUG bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya isu gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Anggaran responsif gender (ARG) yang di susun oleh OPD. Pada tahun 2024 jumlah OPD yang telah menyusun ARG sebanyak 29 OPD dari total 29 OPD di Kabupaten Grobogan.

Anggaran responsif gender (ARG) adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari



perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pemba-ngunan nasional.

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarus-utamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.3  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 1

| No. | Sasaran                                                                                 | Indikator                                      | Meta Indikator                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                       | 3                                              | 4                                                                                       |
| 1   | Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG) | Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Jumlah Anggaran APBD Non Sekertariat dikali 100 |

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga adalah dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2024, Jumlah Anggaran Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD sebesar Rp 117.189.141.600,00 (seratus tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan Jumlah Seluruh



belanja Operasional dan modal di APBD sebesar Rp 1.289.201.503.915,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh Sembilan milyar dua ratus satu juta lima ratus tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG) adalah dengan menghitung Jumlah Anggaran Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD dibagi Jumlah Seluruh belanja Operasional dan modal di APBD dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 117.189.141.600,00}{\text{Rp } 1.289.201.503.915,00} \times 100 = 9,09\%$$

Pesentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD tahun 2024 mencapai **9.09%**.

Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

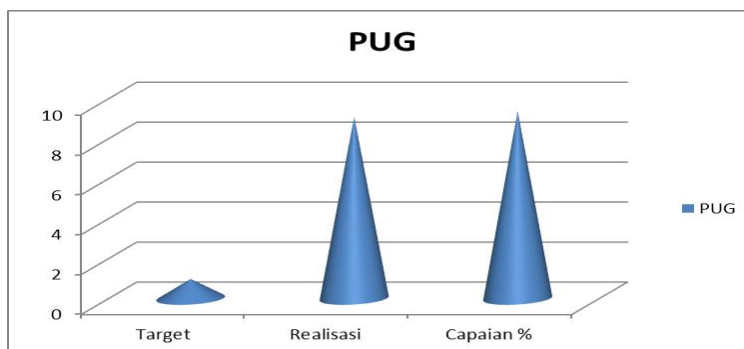
Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Tujuan I

| No. | Indikator Sasaran                   | 2024   |           |           | Kategori      |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
|     |                                     | Target | Realisasi | Capaian % |               |
| 1   | 2                                   | 3      | 4         | 5         | 6             |
| 1.  | Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG) | 0,97   | 9.09      | 937,11 %  | Sangat Tinggi |



Gambar 3.1

Grafik Capaian Kinerja Tujuan I



Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa ARG yang dicapai pada Tahun 2024 sebesar 9.09. Jika dibandingkan dengan target ARG tahun 2024 sebesar 0.97, maka capaian ARG tahun 2024 sebesar 937,11%. Artinya Target ARG tahun 2024 tercapai dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Semakin tinggi persentase ARG, menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan semakin responsif untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh.

#### I.1 Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.

Kinerja Sasaran 1.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ; Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.5  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran I

| No. | Sasaran                                | Indikator          | Meta Indikator                                           |
|-----|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                  | 4                                                        |
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan | Level APE          | Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian PPPA RI. |
|     |                                        | Persentase lembaga | Jumlah penyedia layanan                                  |



|  |            |                                          |                                                                                                                                                   |
|--|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Perempuan. | Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG    | peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender di bagi Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga |
|  |            | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah | Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah di bagi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah                                |

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian kinerja sasaran 1.1 adalah dari Kementerian PPPA RI untuk Level APE dan Sistem Data Gender dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja **“Capaian Level APE.”**

Data yang ada menyebutkan bahwa dalam Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) atau Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2024 Kabupaten Grobogan mendapatkan **Kategori MADYA**. Capaian ini sesuai dengan target kinerja tahun 2024.

b. Indikator Kinerja **“Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG ”.**

Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender sebanyak 30 organisasi sedangkan Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebanyak 35 organisasi.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG adalah dengan menghitung Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dibagi Jumlah Lembaga penyedia



layanan peningkatan kualitas keluarga dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{30 \text{ organisasi}}{35 \text{ organisasi}} \times 100 = 85,71\%$$

c. Indikator Kinerja **“Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah.”**

Jumlah Perempuan yang menduduki Jabatan di Lembaga Pemerintah sebanyak 6.279 orang, sedangkan Jumlah Perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah sebanyak 10.174 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah adalah dengan menghitung Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah Perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{6.279 \text{ orang}}{10.174 \text{ orang}} \times 100 = 85,71\%$$

Capaian Kinerja Sasaran 1.1 **Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan**, pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

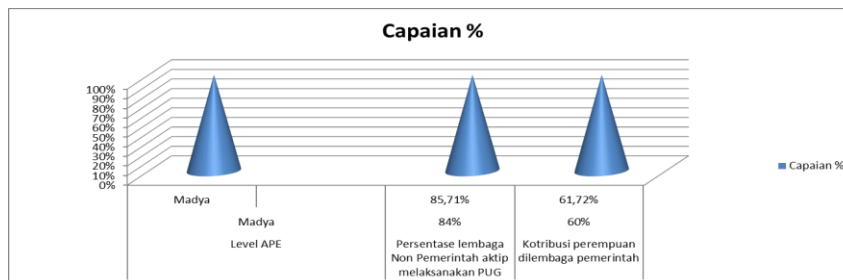
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 1.1

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                               | Indikator Kinerja                                        | Target | Realisasi | Capaian<br>% | Kategori<br>/Kode |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan | Level APE                                                | Madya  | Madya     | 100%         | Sangat Tinggi     |
|     |                                                  | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG | 84%    | 85,71%    | 102.04%      | Sangat Tinggi     |
|     |                                                  | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                 | 60%    | 61,72%    | 102.87%      | Sangat Tinggi     |



Gambar 3.2

Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1.1



Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.1, menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan dinilai berhasil.

## I.2 Sasaran 1.2 : Meningkatkan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun; Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA; dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.7  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 1.2

| No. | Sasaran                                           | Indikator                                               | Meta Indikator                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                       | 4                                                                                            |
| 1.2 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan. | Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun              | Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun dibagi Jumlah seluruh umur perkawinan dikali seratus |
|     |                                                   | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                         | Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian PPPA RI.                                     |
|     |                                                   | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dibagi Jumlah     |





|  |  |                                                    |                                  |
|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | Korban Kekerasan dikali seratus. |
|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan adalah dari Kementerian PPPA RI untuk Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA dan Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja **“Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA.”**

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2024 Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak **Kategori MADYA**. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui pengintegrasian kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pembangunan anak di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di kabupaten/kota, yang berarti pembangunan di kabupaten/kota mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di:

- setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- setiap tingkatan wilayah, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Evaluasi KLA merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA



serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA tidak sekadar selesai dengan penetapan peringkat, akan tetapi evaluasi KLA justru memicu perencanaan yang lebih baik.

b. Indikator Kinerja **“Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun.”**

Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun sebanyak 146 Pasangan, sedangkan Jumlah Seluruh Umur Perkawinan sebanyak 790.539 pasangan (Kuartal 1 Tahun 2024 ).

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun adalah dengan menghitung Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun dibagi Jumlah seluruh umur perkawinan dikali seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{146 \text{ Pasangan}}{790.539 \text{ Pasangan}} \times 100 = 0.018$$

c. Indikator Kinerja **“Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.”**

Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban sebanyak 49 orang, sedangkan Jumlah Korban Kekerasan sebanyak 49 orang terdiri dari 31 Laki-laki dan 65 Perempuan. Kasus kekerasan SEKSUAL merupakan kasus terbanyak yang dialami korban. Pada tahun 2024, kasus kekerasan SEKSUAL sebanyak 38 kasus disusul Kekerasan FISIK sebanyak 33 Kasus, sedangkan sisanya terdiri dari Kasus EKSPLOITASI sebanyak 9 Kasus; Kasus SPIKIS sebanyak 8 Kasus; Kasus Penelantaran sebanyak 7 Kasus dan 1 kasus lainnya.

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh DP3AKB kepada Korban Kekerasan berupa : Layanan Hukum; Pendampingan; Mediasi; Kesehatan dan Penjangkauan Korban. Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Korban Kekerasan



yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban adalah dengan menghitung Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dibagi Jumlah Korban Kekerasan dikali seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{96 \text{ orang}}{96 \text{ orang}} \times 100 = 100 \%$$

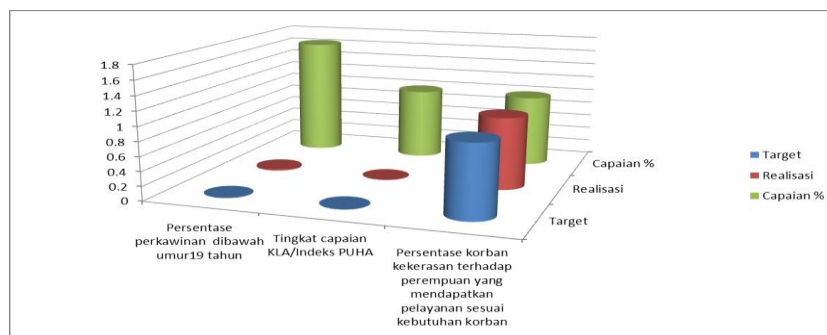
Capaian Kinerja Sasaran **1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**, pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran 1.2

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                  | Indikator Kinerja                                                                                 | Target  | Realisasi | Capaian % | Kategori /Kode |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| a.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0,0505% | 0.01802   | 165%      | Sangat Tinggi  |
|     |                                                                  | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya   | Madya     | 100%      | Sangat Tinggi  |
|     |                                                                  | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%    | 100%      | 100%      | Sangat Tinggi  |

Gambar 3.3

Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1.2





Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.2, menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dinilai berhasil.

## II. Tujuan 2 : Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk.

Kinerja Tujuan 2 diukur dengan satu (1) indikator, indikator tersebut adalah **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**.

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya. Angka TFR yang ideal adalah 2,1 karena menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. TFR yang berada di bawah angka 2,1 akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk, sedangkan TFR yang lebih dari 2,1 akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.

Indikator Total Fertility Rate (TFR) dihitung dengan membagi jumlah kelahiran perempuan usia 15–49 tahun dengan jumlah perempuan usia 15–49 tahun pada periode yang sama. Berikut langkah-langkah perhitungan TFR:

1. Jumlahkan semua tingkat kesuburan menurut usia.
2. Kalikan jumlah tersebut dengan 5 (lebar interval kelompok usia) .
3. Bagikan hasil perkalian dengan 1.000 .

Pada tahun 2024, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Grobogan sebesar 2.04 yang artinya rata-rata orang hamil di Kabupaten Grobogan 2.04 dari target 2.19.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.9  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 2

| No. | Tujuan/ Sasaran                            | Indikator                  | Meta Indikator                                                           |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                          | 3                          | 4                                                                        |
| 2   | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk | Total fertility Rate (TFR) | Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa |



|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  | suburnya.<br>$TFR = ASFR \times 5$ |
|--|--|--|------------------------------------|

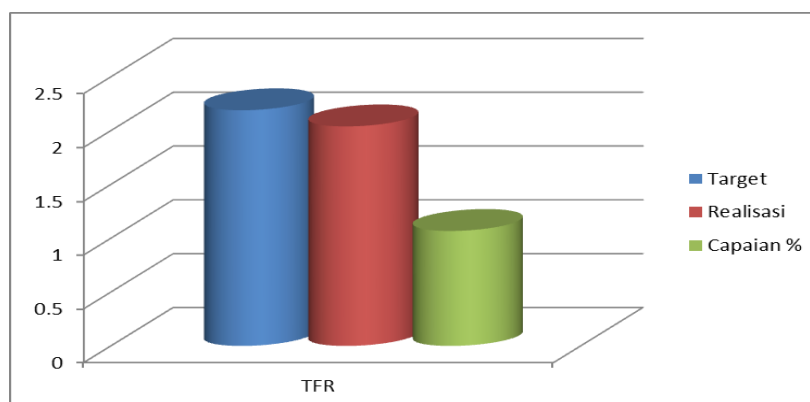
Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian Tujuan 2 Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS.

Kinerja Tujuan Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Tujuan 2

| No. | Indikator Sasaran          | 2024   |           |           | Kategori      |
|-----|----------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
|     |                            | Target | Realisasi | Capaian % |               |
| 1   | 2                          | 3      | 4         | 5         | 6             |
| 2   | Total Fertility Rate (TFR) | 2.19   | 2.00      | 108,68 %  | Sangat Tinggi |

Gambar 3.4  
Grafik Capaian Kinerja Tujuan 2





Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa TFR yang dicapai pada Tahun 2024 sebesar 2.00. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2024 sebesar 2.19, maka capaian TFR tahun 2024 sebesar 108.68%.

Target TFR tahun 2024 tercapat dengan kategori **Sangat Tinggi**. Semakin rendah persentase TFR, menunjukan bahwa Kabupaten Grobogan mampu mengendalikan jumlah penduduk, sehingga kualitas hidup penduduk Kabupaten Grobogan dapat meningkat.

## II.1 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga

### Berencana

Capaian Kinerja Sasaran 2.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : ASFR 15-19; Persentase Peserta KB Aktip MKJP; dan Unmet Need. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.11  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.1

| No. | Sasaran                                                  | Indikator                        | Meta Indikator                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                        | 3                                | 4                                                                                                                                                 |
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana | ASFR 15-19                       | Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000 |
|     |                                                          | Persentase Peserta KB Aktip MKJP | Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x 100                                                  |
|     |                                                          | Unmet Need                       | Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi seluruh PUS x100.                                                            |

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah



dari Bidang P4KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

1. Indikator Kinerja “**ASFR 15-19**”

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 pada Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebanyak 33 kelahiran, sedangkan jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada tahun 2024 sebanyak 50.828 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian Indikator **ASFR 15-19** adalah Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{33 \text{ kelahiran}}{50.828 \text{ orang}} \times 1000 = 7.57$$

2. Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebanyak 66.121 orang sedangkan Jumlah Peserta KB sebanyak 269.390 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktip MKJP adalah dengan menghitung Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{66.121 \text{ orang}}{269.390 \text{ orang}} \times 100 = 24.54 \%$$

3. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di tunda sebanyak 32.907 orang, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 116.951 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Unmet Need adalah dengan menghitung Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak



Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{32.560 \text{ orang}}{351.373 \text{ orang}} \times 100 = 9,26 \%$$

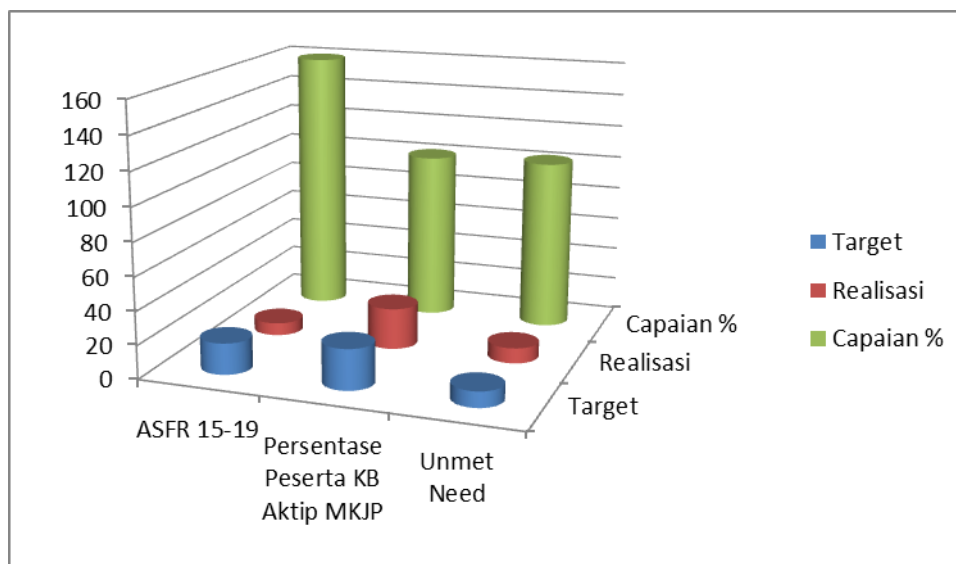
Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Sasaran 2.1

| No. | Tujuan/ Sasaran                                          | Indikator Kinerja                | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori /Kode |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana | ASFR 15-19                       | 18.8   | 7.57      | 159.73    | Sangat Tinggi  |
|     |                                                          | Persentase Peserta KB Aktip MKJP | 24.5   | 24.85     | 101.43    | Sangat Tinggi  |
|     |                                                          | Unmet Need                       | 9.5    | 9.22      | 102.95    | Sangat Tinggi  |

Gambar 3.5

Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2.1



Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.1, menunjukan capaian





yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dinilai berhasil.

## II.2 Sasaran 2.2 : Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga.

Capaian Kinerja Sasaran 2.2 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah : Persentase anggota kelompok pembangunan keluarga aktif dan Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.13  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.2

| No. | Sasaran                                                       | Indikator                                              | Meta Indikator                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                                                      | 4                                                                                     |
| 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga. | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif | Jumlah anggota Poktan Aktip dibagi seluruh anggota Poktan x 100                       |
|     |                                                               | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera            | Jumlah Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera x 100 |

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga adalah dari Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

### 1. Indikator Kinerja **“Persentase anggota kelompok pembangunan-an Keluarga aktif .”**

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) pada Tahun 2024 sebanyak 5.008 sedangkan Jumlah seluruh Anggota Poktan sebanyak 6.073 orang.



Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif adalah dengan menghitung Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) dibagi Jumlah seluruh Anggota Poktan dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{5.118 \text{ orang}}{6.73 \text{ Orang}} \times 100 = 84.27\%$$

2. Indikator Kinerja **“Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera.”**

Jumlah Tahapan Keluarga Prasejahtera sebanyak 162.266 orang, sedangkan seluruh tahapan Keluarga Sejahtera sebanyak 521.195 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera adalah dengan menghitung Jumlah Tahapan Keluarga Prasejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{162.266 \text{ orang}}{521.195 \text{ orang}} \times 100 = 31.13\%$$

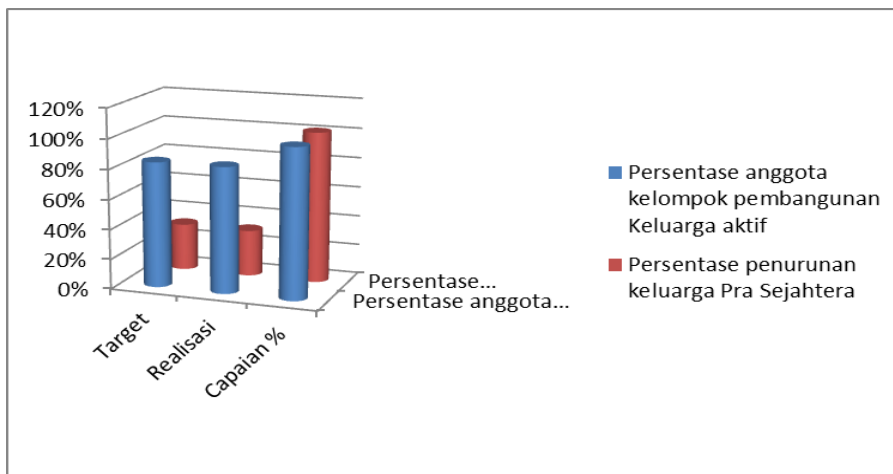
Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Keberdayaan Kelompok dalam Pembangunan Keluarga pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Capaian Kinerja Sasaran 2.2

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                                           | Indikator<br>Kinerja                                   | Target | Realisasi | Capaian<br>% | Kategori<br>/Kode |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif | 84.00% | 84.27%    | 100,32%      | Sangat Tinggi     |
|     |                                                              | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera            | 31.50% | 31.13%    | 101.17%      | Sangat Tinggi     |

Gambar 3.6

Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2.2



Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.2, menunjukan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatnya keberdayaan kelompok kegiatan dalam pembangunan keluarga dinilai berhasil.

### III. Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Kinerja Tujuan 3 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah **Nilai evaluasi SAKIP PD** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.15  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 3

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                                       | Indikator                           | Meta Indikator |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                                   | 4              |
| 3   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Nilai evaluasi SAKIP PD             |                |
|     |                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD |                |



**III.1. Sasaran 3.1.** Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Capaian Kinerja Sasaran 3.1 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah : Nilai evaluasi SAKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.16  
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 3.1

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                                                                                                        | Indikator                           | Meta Indikator |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                                   | 4              |
| 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik. | Nilai evaluasi SAKIP PD             |                |
|     |                                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD |                |

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas adalah dari Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

#### **3.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP PD.**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur. SAKIP dirancang untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. SAKIP terdiri dari : Perencanaan kinerja, Pengukuran capaian kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



SAKIP bermanfaat untuk:

1. Mengukur kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

SAKIP merupakan perhitungan nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar BB (75,60) dengan Predikat BAIK, atau tercapai sebesar 107,14% dari target yang direncanakan sebesar BB (70,00). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Komponen Evaluasi Perencanaan Strategis.

Evaluasi strategis meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Renstra, kualitas renstra dan implementasi renstra. Score yang di dapat sebesar 21,60 meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 8,00 point.

- b. Komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja tahunan meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Evaluasi Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Implementasi perencanaan Kinerja Tahunan. Nilai yang didapat sebesar 18,00 point. Meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 15,60 point.



c. Komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pengukuran, dan Implementasi Pengukuran Kinerja. Nilai yang didapat sebesar 30,00 point. Meningkatkan dibanding capaian tahun 2023 sebesar 20,94 point.

d. Komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja.

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Pelaporan Kinerja, Evaluasi Penyajian Informasi Evaluasi terhadap Evaluasi Internal. Pada Evaluasi Internal terdapat komponen yang dievaluasi yaitu Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, dan Pemanfaatan Evaluasi. Nilai yang didapat sebesar 12 point. Meningkatkan dibanding capaian tahun 2023 sebesar 6,20 point.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1 : **Nilai Evaluasi SAKIP PD** Tahun 2024 sebesar 75,6 point kategori BB, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 64,25 point kategori B, maka capaian kinerjanya sebesar 107.14% atau naik sebesar 17.67%.

### **3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengamanatkan agar penyelenggara negara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, maka diselenggarakan survey atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.



Hasil survey kepuasan masyarakat yang didapat, merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Tujuan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM), adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Hasil pengolahan data SKM terhadap Pelayanan KB, dapat diperoleh data sebagai berikut :

- Persyaratan 3,313 point;
- Kemudahan Prosedur 3,281 point;
- Waktu pelayanan 3,250 point;
- Biaya/Tarif 3,313 point;
- Produk layanan 2,813 point;
- Kompetensi Pelaksana 2,781 point;
- Perilaku Pelaksana 3,188 point;
- Sarana dan Prasarana 2,875 poin;
- Penanganan pengaduan 3,188 point.

**IKM Unit layanan 77,78 dengan predikat B (baik).**

Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar B (77,78) atau tercapai sebesar 100,10% dari target yang dijanjikan sebesar B (77,70). Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan.



**B. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**  
diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                        | 3                                                                                                 | 4                            | 5                            | 6                            | 7                 | 8                |
| 1   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga; | PUG / ARG                                                                                         | 0.95                         | 9.69                         | 9.09                         | 0.99              | 918.18%          |
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                         | Level APE                                                                                         | Madya                        | Madya                        | Madya                        | Madya             | 100%             |
|     |                                                                                          | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 70.00%                       | 77.00%                       | 85.71%                       | 84%               | 102.04%          |
|     |                                                                                          | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 53.68%                       | 59.60%                       | 61.72%                       | 52%               | 118.69%          |
| 1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                         | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0,2090                       | 0,0017                       | 0.01802                      | 0,0610            | 179,46%          |
|     |                                                                                          | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya                        | Madya                        | Madya                        | Madya             | 100.00%          |
|     |                                                                                          | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 100%              | 100.00%          |





| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                      | 2022      |           |           | 2023      |           |           | 2024    |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                       |                                                        | Target    | Realisasi | % Capaian | Target    | Realisasi | % Capaian | Target  | Realisasi | % Capaian |
| B   | Mengendalikan Jumlah dan Kualitas penduduk                                                                                                            | TFR                                                    | 2.2       | 1.99      | 109.55%   | 2.25      | 2.21      | 101.78%   | 2.19    | 2.00      | 108.68%   |
| b.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | ASFR 15-19                                             | 13.00     | 19.2      | 52.32     | 47.00     | 22.00     | 153.9%    | 18,8%   | 7.57%     | 159.73%   |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktip MKJP                       | 23.00     | 23.16     | 100.70%   | 23.50     | 24.10     | 102.55%   | 24,5%   | 78,01     | 318.41%   |
|     |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                             | 10.84     | 9.51      | 112.27%   | 9.40      | 9.58      | 98.08%    | 9,5%    | 9,22      | 102,95%   |
| b.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif | 82.00     | 79.91     | 97.45%    | 82.00     | 81.41     | 99.29%    | 84%     | 84.27%    | 100.32%   |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera            | 32.50     | 32.97     | 101.45%   | 32.50     | 32.49     | 100.03%   | 31,50%  | 31,13%    | 101,17 %  |
| C   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                                                 | Nilai evaluasi SAKIP PD                                | 65        | 68        | 104.62    | 68        | 64.25     | 94.49     | 70      | 75        | 107.14    |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                    | B (76.70) | B (76.14) | 99.27     | B (76.70) | B (77.48) | 101.02%   | B(77.7) | B (77,78) | 100.10%   |
| c.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                | B (65)    | B (68.00) | 104.62    | B (68)    | B (64.25) | 94.49%    | BB(70)  | BB (75)   | 107.14%   |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                    | 76.7      | 76.14     | 99.27     | 76.7      | 77.48     | 101.02    | 77.7    | 77.78     | 100.1     |

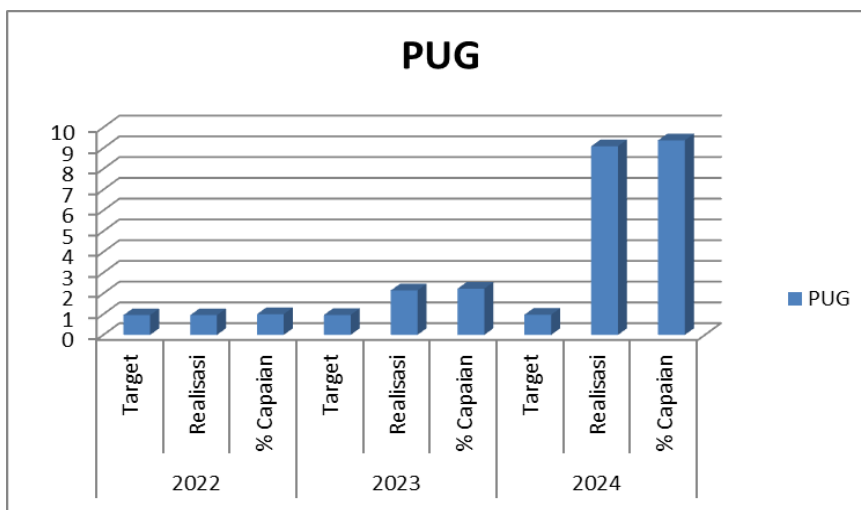


**Uraian penjelasan tabel :**

1. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan I **“Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,”** tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2022-2024) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.7

Grifik Capaian ARG / PUG Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan I “Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,” mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Indikator PUG/ARG Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebesar 0.95 % dan tahun 2023 naik menjadi 2.14 % dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 menjadi 9.09 %. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah meningkat dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi, hukum maupun politik.

Selanjutnya berdasarkan tabel 3.17, dapat diketahui bahwa capaian sasaran 1.1 **“Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan”** juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

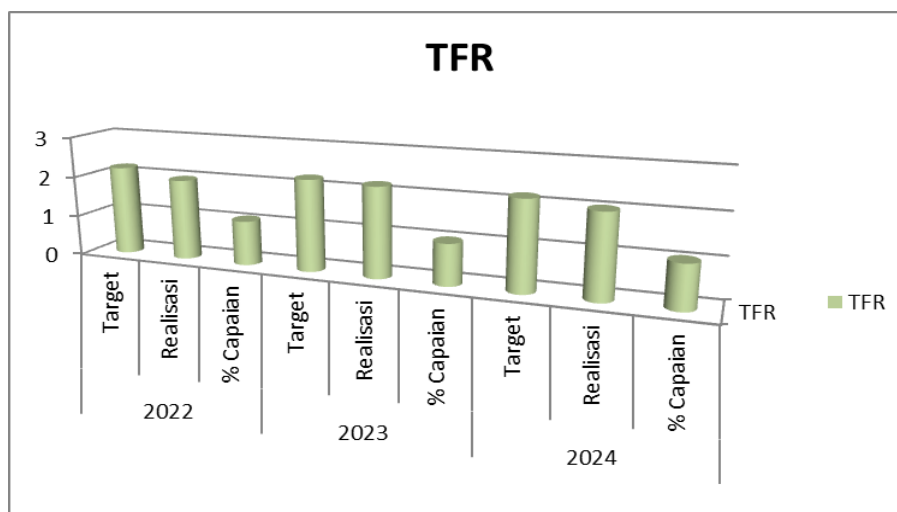


Dari ketiga Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 *“Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,”* juga mengalami kenaikan yang cukup dinamis, dimana dari ketiga indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur, hanya satu indikator yang menunjukkan trend positif / kenaikan, yaitu indikator *“Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun”*. Sedangkan Indikator yang lain cenderung stagnan, karena bersifat kualitatif.

2. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 *“Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk,”* tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2022-2024) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8  
Grifik Capaian TFR Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan II **“Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,”** mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Indikator *TFR* Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebesar 1.99 dan tahun 2023 turun menjadi 2.21 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 menjadi 2.04 %.



Hal ini menunjukkan bahwa semakin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya berdasarkan tabel 3.17, dapat diketahui bahwa capaian sasaran 2.1 *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana”* juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dari Ketiga Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

- a. Capaian Indikator *ASFR 15-19*, pada tahun 2022 sebesar 19.20 kelahiran per 1000 wanita dan pada tahun 2023 turun menjadi 22 kelahiran per 1000 wanita kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 7.57 kelahiran per 1000 wanita .
- b. Capaian Indikator *Persentase Peserta KB Aktif MKJP*, terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 23.16 %, dan pada tahun 2023 naik menjadi 76,84% dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 78.01%.
- c. Capaian Indikator *Unmet Need* juga mengalami kenaikan yang cukup dinamis, dimana pada tahun 2022 sebesar 9,51 % dan pada tahun 2023 turun menjadi 9.58 %, kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 9.22%.

Capaian sasaran 2.2, *“Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga,”* juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dari Kedua Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

- a. Capaian Indikator *Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif*, pada tahun 2022 sebesar 79.91% dan pada tahun 2023 naik menjadi 81.41% kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 84.27%.

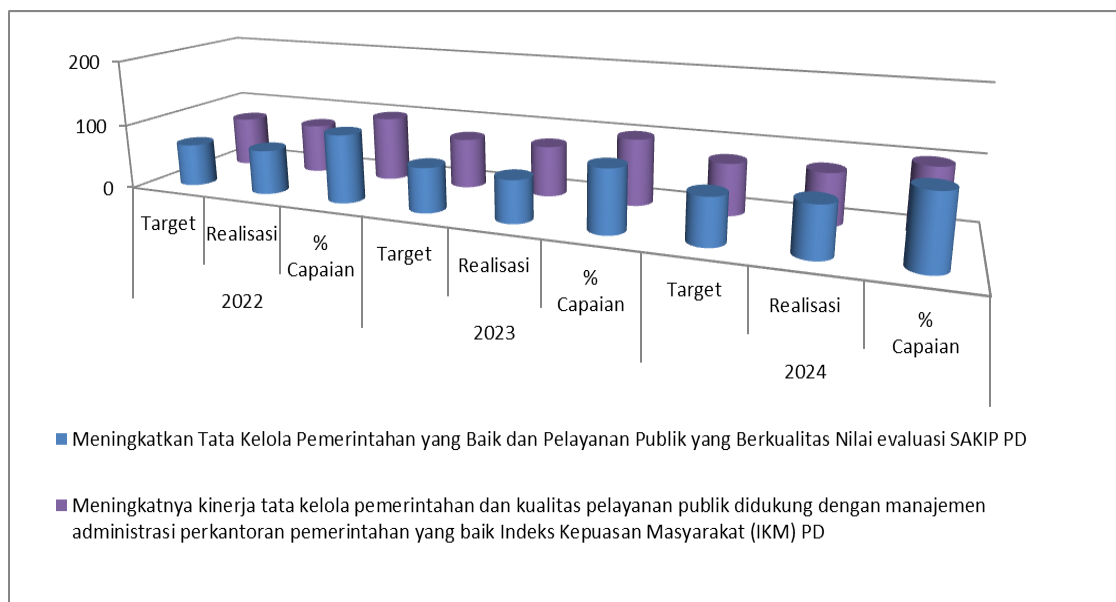


b. Capaian Indikator *Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera*, terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 32.97 %, dan pada tahun 2023 naik menjadi 32.49% dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 31.13%.

3. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,”** tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2022-2024) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9

Grifik Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian/realisasi *Nilai SAKIP* di Kabupaten Grobogan mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian SAKIP Kabupaten Grobogan memperoleh nilai 68 point, dan pada tahun 2023 nilai yang diperoleh turun menjadi 64.25 point kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.77 point. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan semakin Akuntabel.



Selanjutnya, capaian/realisasi *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD* di Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian IKM Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 memperoleh nilai 76.14 point, dan pada tahun 2023 naik menjadi 77.48 point kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.78 point. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan semakin baik.



**C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan periode 2021-2026**  
diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                 | 6                            | 7                 | 8                |
| 1   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;                                                              | PUG / ARG                                                                                         | 9,09                         | 0.99              | 918.18%          |
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Level APE                                                                                         | Madya                        | Madya             | 100%             |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 85.71%                       | 84%               | 102.04%          |
|     |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 61.72%                       | 52%               | 118.69%          |
| 1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0.01802                      | 0,0610            | 179,46%          |
|     |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya                        | Madya             | 100.00%          |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%                         | 100%              | 100.00%          |
| 2   | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk                                                                                                            | TFR                                                                                               | 2.00                         | 2.16              | 107.41%          |
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | ASFR 15-19                                                                                        | 7.57                         | 18                | 157.94%          |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                                                                  | 78,01                        | 25                | 312.04%          |
|     |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                                        | 9,22                         | 9,5               | 102.95%          |
| 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif                                            | 84,27                        | 86                | 97.99%           |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                       | 31,13%                       | 30,5              | 97.93%           |
| 3   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                                                 | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB (75)                      | BB (73,5)         | 102.04%          |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B (77,78)                    | B (79,70)         | 97.48%           |
| 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB (75)                      | BB (73,5)         | 102.04%          |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B (77,78)                    | B (79,70)         | 97.48%           |

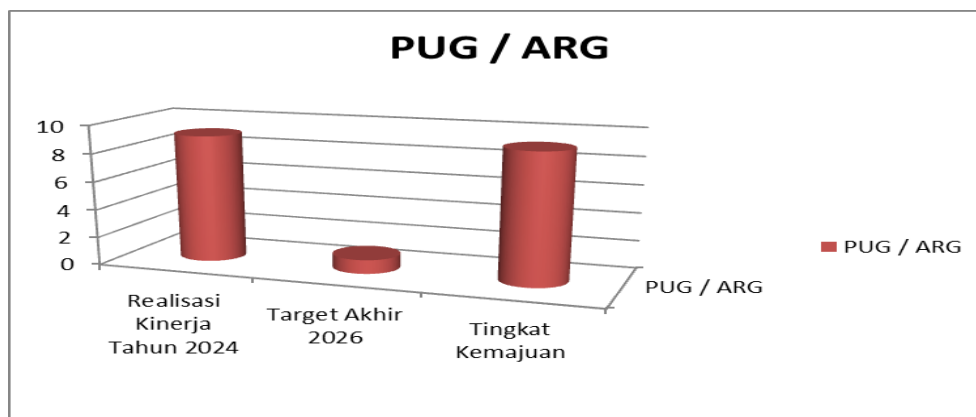


Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 **“Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,”** tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

Target PUG/ARG tahun 2026 sebesar 0.99 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 9.09, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 918,18 % artinya bahwa pada tahun 2024 target Pengarusutamaan Gender telah terlampaui/tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah meningkat dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi, hukum maupun politik.

Gambar 3.10  
Grafik Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja PUG/ARG



- a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 **“Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan,”** tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2024, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori MADYA.





Sedangkan target Renstra tahun 2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan dengan Kategori MADYA sehingga tingkat kemajuannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Persentase lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG pada tahun 2024 sebesar 85.71% dan telah melampaui target Renstra tahun 2026 yakni 84%, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102,04 %.
- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2024 sebesar 61.72% dan telah melampaui target Renstra tahun 2026 yakni 52%, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 118.69 %.

a.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2 “Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,” tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator menurunnya Persentase Perkawinan dibawah Umur 19 Tahun, pada tahun 2024 sebesar 0.01802 dan telah melampaui target Renstra tahun 2025 yakni 0.0610, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 179,46 %.
- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA APE tahun 2024, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori MADYA. Sedangkan target Renstra tahun 2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan dengan Kategori MADYA, hal ini



menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

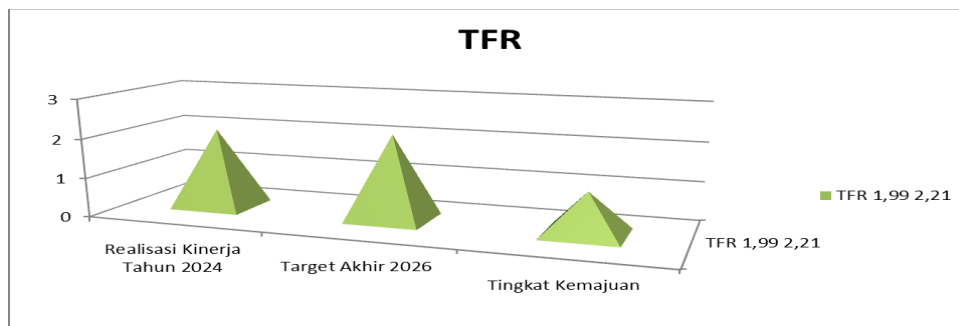
- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban, pada tahun 2024 sebesar 100 % dan telah melampaui target Renstra tahun 2025 yakni 100 %.

- b. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,” tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *TFR* adalah sebesar 2.16 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 2.00, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 107.41% artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada pada kondisi penduduk tumbuh seimbang.

Gambar 3.11

Grafik Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja *TFR*





b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2024 adalah 7.57 kelahiran per 1000 wanita masih lebih besar di banding target akhir Renstra tahun 2026 yakni 18.00 kelahiran per 1000 wanita, Sehingga tingkat kemajuannya sebesar 99.89%. Artinya perlu upaya yang lebih untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2026.
- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2024 sebesar 78.01% lebih besar dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 25 %, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 312.04%.
- ✓ Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2024 sebesar 9.22 lebih kecil dibanding target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 9.5, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102.95%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mudah menjangkau akses pelayanan KB dan masih perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan.

b.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2 “Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga,” tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif, pada tahun 2024 sebesar 84.27% lebih kecil dibanding Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 86 %, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 97.99%.
- ✓ Capaian Kinerja Menurunnya Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera, pada tahun 2024 sebesar 31.13% lebih besar dari Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 30.50%.



c. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” tahun 2024 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ❖ Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *Nilai evaluasi SAKIP PD* adalah sebesar 73.50 Point (Kategori Sangat Baik BB) sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 75 Point (Kategori Sangat Baik BB), sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102.04%.
- ❖ Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* adalah sebesar 79.70 Point (Kategori Baik B) sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 77.78 Point (Kategori Baik B), sehingga tingkat kemajuannya sebesar 97.48%.



**D. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan atau Kabupaten Tetangga,**  
diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/**

| No.      | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                 | Realisasi Tahun 2024 | Standar Provinsi | Standar Nasional | % Capaian   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                      |                  |                  | Jawa Tengah | Nasional |
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                 | 4                    | 5                | 6                | 7           | 8        |
| <b>A</b> | <b>Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;</b>                                                       | ARG/PUG                                                                                           | 9.09                 | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
| a.1      | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Level                                                                                             | Madya                | Mentor           | n/a              | n/a         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | APE                                                                                               |                      |                  |                  |             |          |
|          |                                                                                                                                                       | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 85.71%               | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 61.72%               | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
| a.2      | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0.01802              | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya                | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%                 | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
| <b>B</b> | <b>Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk</b>                                                                                                     | TFR                                                                                               | 2.00                 | 2.09             | 2.1              | 104.31      | 104.76   |
| b.1      | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | ASFR 15-19                                                                                        | 7.57                 | 21               | 19.07            | 114.19      | 105.51   |
|          |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                                                                  | 78.01                | n/a              | 68.6             | n/a         | 111.32   |
|          |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                                        | 9.22                 | 5.70             | 7.40             | 38.25       | 75.41    |
| b.2      | Meningkatnya keberdayaan kelompok pembangunan Keluarga aktif dalam pembangunan keluarga                                                               | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif                                            | 84.27                | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                       | 31.13                | n/a              | n/a              | n/a         | n/a      |
| <b>C</b> | <b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas</b>                                                          | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB (75)              | 65.93            | n/a              | 113         | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B (77,78)            | 87.50            | n/a              | 88.89       | n/a      |
| c.1      | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                           | BB (75)              | 65.93            | n/a              |             | n/a      |
|          |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                                                               | B (77,78)            | 87.50            | n/a              | 88.89       | n/a      |



Dari tabel diatas terlihat ada beberapa Indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Jawa Tengah dan atau Capaian Kementrian PPPA dan BKKBN RI. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator tidak di pergunakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Kementrian PPPA dan BKKBN RI sehingga capaian kinerjanya tidak dapat diperbandingkan. Hal ini bukan berarti bahwa program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Grobogan tidak selaras dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun tidak selaras dengan program Pemerintah Pusat.

a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 “Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan,” tahun 2024 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2024, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori MADYA. Sedangkan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah memperoleh Kategori Mentor. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan masih dibawah capaian kinerja Provinsi dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

d. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,” tahun 2024 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator *TFR* tahun 2024 sebesar 2.00, lebih baik dibandingkan capaian TFR Provinsi Jawa Tengah yakni 2.09 dan capaian indikator TFR Nasional yakni 2.10 artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada pada kondisi penduduk tumbuh seimbang.



b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2024 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2024 adalah 7.57 kelahiran per 1000 wanita lebih kecil di banding capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah yakni 21.00 kelahiran per 1000 wanita dan Capaian kinerja Nasional yakni 19.07.
- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2024 sebesar 78.01% lebih besar dibandingkan Capaian Kinerja Nasional yakni 68.60 %.
- ✓ Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2024 sebesar 9.22 lebih besar dibanding capaian kinerja provinsi sebesar 5.7 dan capaian kinerja nasional sebesar 7.4.

e. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut : :

- ❖ Capaian Indikator *Nilai evaluasi SAKIP PD* adalah sebesar 75 Point (Kategori Sangat Baik BB), lebih besar dibanding Capaian Provinsi Jawa Tengah yakni 65,93 Point.



**E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :**

Tabel 3.20

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No. | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                 | Target  | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| A   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga; | PUG                                                                                               | 0,97    | 9,09      | 937.11%   |                                 |                       |
| a.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                         | Level APE                                                                                         | Madya   | Madya     | 100%      |                                 |                       |
|     |                                                                                          | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG                                          | 84%     | 85,71%    | 102.04%   |                                 |                       |
|     |                                                                                          | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                          | 60%     | 61,72%    | 102.87%   |                                 |                       |
| a.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                         | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0,0505% | 0.01802   | 165%      |                                 |                       |
|     |                                                                                          | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya   | Madya     | 100%      |                                 |                       |
|     |                                                                                          | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%    | 100%      | 100%      |                                 |                       |





|     |                                                                                                                                                       |                                                        |         |           |          |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|--|
| B   | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk                                                                                                            | TFR                                                    | 2.19    | 2.00      | 106,85 % |  |  |
| b.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | ASFR 15-19                                             | 18.80%  | 7.57%     | 159.73%  |  |  |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktip MKJP                       | 24.50%  | 78.01     | 318.41%  |  |  |
|     |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                             | 9.50%   | 9.22      | 102,95%  |  |  |
| b.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif | 84%     | 84.27%    | 100.32%  |  |  |
|     |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera            | 31.50%  | 31.13%    | 101.17%  |  |  |
| C   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                                                 | Nilai evaluasi SAKIP PD                                | BB(70)  | BB (75)   | 107.14%  |  |  |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                    | B(77.7) | B (77.78) | 100.10%  |  |  |
| c.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                | BB(70)  | BB (75)   | 107.14%  |  |  |
|     |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD                    | B(77.7) | B (77.78) | 100.10%  |  |  |



## **E.I Penyebab Keberhasilan.**

### **E.I.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga.**

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 6 Indikator . Dari 6 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.1.a Capaian Level APE sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan kebijakan;  
Pada tahun 2024, DP3AKB Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pekerjaan Bimbingan Teknis Kaukus Perempuan Politikus Indonesia (KPPI) dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik Hukum dan Sosial.
- Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi ketahanan keluarga.

Pada tahun 2024, DP3AKB Kabupaten Grobogan telah mengoptimalkan peran Forum Kesenjangan dan Keadilan Gender (FKKG) dalam Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Menjadikan FKKG sebagai wahana advisory / penganjur upaya - upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan oleh para pihak, dengan mendasarkan pada aturan maupun kebijakan yang sudah ada, serta membantu meningkatkan komitmen yang dapat mempercepat pencapaian kesetaraan keadilan Gender.

E.I.1.b Presentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG sebesar

102.04%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penguatan peran Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.



- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

E.I.1.c Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah, sebesar 102.87%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.

E.I.1.d Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun, sebesar 165%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kabupaten.
- Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat.
- Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kecamatan.

E.I.1.e Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA, sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Fasilitasi Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten.

E.I.1.f Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban, sebesar 100%.

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

## **E.I.2 Tujuan 2 : Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk**

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 5 Indikator . Dari 5 indikator yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.2.a ASFR 15-19 sebesar 104.15 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Pembinaan Forum Genre dan PIK Remaja;



- Pemilihan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Grobogan.
- Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat.
- Penyediaan Biaya Operasional untuk pendampingan sasaran Calon Pengantin (CATIN).

E.I.2.b Persentase Peserta KB Aktip MKJP, sebesar 101,43%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan KB di Faskes.
- Penyediaan biaya pembinaan KB Pasca Persalinan.
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

E.I.2.c Unmet Need, sebesar 102,95%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyediaan Biaya Operasional Distribusi ALOKON);
- Penyediaan Biaya Operasional Penguatan Kampung KB Tingkat Kabupaten.
- Penyediaan Biaya Pembinaan dan Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas..
- Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

E.I.2.d Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif, sebesar 100,32%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyelenggaraan orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK).



- Penyediaan Biaya Operasional Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan KB.

E.I.2.e Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera, sebesar 101,17%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

### **E.I.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.**

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 1 Sasaran dengan 2 Indikator . Dari 2 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.3.a Nilai evaluasi SAKIP PD, sebesar 107,14 %;

Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Dilaksanakannya Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- Penyediaan Akomodasi Rapat Monitoring dan evaluasi.

E.I.3.b Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD, sebesar 100.10 %;

Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
- Tersedianya Sumber Daya manusia yang kompeten.

### **E.II. Hambatan.**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

❖ Hambatan yang disebabkan Faktor Sosial Budaya

Faktor Sosial Budaya adalah faktor yang sulit diubah di Kabupaten Grobogan. Pada beberapa wilayah tertanam keyakinan yang sangat kuat bahwa bila anak perempuan tidak segera menikah maka akan dianggap “perawan tua” yang menurut tata nilai di wilayah tersebut adalah sebuah gelar yang buruk.

Faktor lain terkait sosial budaya pada kehamilan remaja adalah kecenderungan orang tua yang ingin segera lepas dari tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak perempuannya.

❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota direalisasikan sesuai dengan kasus yang terlapor dan tertangani, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Masyarakat tidak seluruhnya terdeksi.

❖ Tingkat efektifitas ber-KB.

Kesertaan dari Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB yang sangat rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru masih rendah.



Pada tahun 2024, tercatat hanya sebesar 24.85 % dari total PUS sehingga tidak banyak daya ungkitnya untuk menurunkan fertilitas. Hal ini disebabkan segmentasi sasaran program belum difokuskan kepada PUS Usia Muda Paritas Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang benar benar murni bukan dari peserta KB ganti cara yang dicatat sebagai peserta KB baru, disamping itu masih ada wanita melakukan kawin pertama di usia 16-18 tahun.

- ❖ Masih terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga teknis, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan masih memiliki kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk petugas lapangan KB, petugas lapangan KB saat ini dirasa belum cukup memadai untuk bisa memenuhi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Grobogan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya program pengendalian penduduk.
- ❖ Sarana dan prasarana yang belum cukup menunjang khususnya di bidang pemetaan perkiraan penduduk, sarana penunjang seperti alat dan juga komputer khusus yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang kegiatan pemetaan sehingga jalannya kegiatan selama ini masih belum bisa optimal.

### **E.III. Solusi Alternatif**

- ❖ Melaksanakan kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor pada peringatan hari kontrasepsi dunia.
- ❖ Menindaklanjuti edaran-edaran dari pusat baik dari BKKBN pusat maupun kementerian/Lembaga lainnya. contohnya kebijakan untuk tidak memangkas anggaran penggerakan KB MKJP pada saat terjadi



*refocusing* maupun *automatic adjustment*, tidak memangkas kegiatan ProPN melibatkan kelompok kegiatan dengan harapan poktan-poktan tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi penurunan TFR.

- ❖ Tetap melaksanakan mekanisme pengendalian program dan kegiatan melalui instrumen moneyv, dengan tujuan salah satunya adalah untuk memonitor pencapaian kinerja secara berkala agar bila terdapat tanda-tanda tidak tercapainya *TFR* dapat segera diambil kebijakan teknis terkait.
- ❖ Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- ❖ Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data.
- ❖ Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak.
- ❖ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.





**F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tersaji pada tabel 3.21 :**

Tabel 3.21

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| No. | Tujuan / Sasaran                                                                         | Indikator Kinerja                                        | % Capaian | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       | % Capaian    | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga; | PUG                                                      | 9,09      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                            | Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender                                                                         | 90%          | Menunjang.                |
| 1.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                         | Level APE                                                | Madya     | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender                                                                                                                | 80%          | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tersedia                                                                                 | 1 Dokumen    | Menunjang.                |
|     |                                                                                          | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG | 85,71%    | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota | Persentase sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG                                                                                                                                       | 80%          | Menunjang.                |
|     |                                                                                          | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                 | 61,72%    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi         | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Organisasi | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                       | Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG                                                                                                                                         | 80%          | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                | 1 Lembaga    | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                      | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | 1 Dokumen    | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban                                                                                       | 100%         | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota           | Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak                                                                                                       | 100%         | Menunjang.                |
|     |                                                                                          |                                                          |           | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota                             | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 1 Dokumen    | Menunjang.                |



|     |                                                                  |                                                                                                   |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                               | <b>Persentase Data Pilah Gender yang tersedia</b>                                                                                                                                                          | <b>100%</b>      | Menunjang.        |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota</b>                         | <b>Persentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender</b>                                                                                                                                                  | <b>100%</b>      | Menunjang.        |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota                                                                                               | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                           | 1 Dokumen        | Menunjang.        |
| 1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                       | 0.01802 | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                              | <b>Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA</b>                                                                                                                                                                   | <b>Madya</b>     | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                   | Madya   | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota</b>                                                   | <b>Persentase Lembaga yang aktif dalam PHA</b>                                                                                                                                                             | <b>78%</b>       | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban | 100%    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 49 Organisasi    | Menunjang.        |
| 2   | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk                       | TFR                                                                                               | 2.00    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                 | <b>Persentase menurunnya Angka Kelahiran</b>                                                                                                                                                               | <b>2.04</b>      | <b>Menunjang.</b> |
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana         | ASFR 15-19                                                                                        | 7.57    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> | <b>Persentase Dokumen GDPK yang tersusun</b>                                                                                                                                                               | <b>100%</b>      | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  | Persentase Peserta KB Aktif MKJP                                                                  | 78,01   | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota                                                                                                    | 1 Dokumen        | Menunjang.        |
|     |                                                                  | Unmet Need                                                                                        | 9,22    | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                       | <b>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</b>                                                                                                                                     | <b>4 Dokumen</b> | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                             | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                    | 1 Laporan        | Menunjang.        |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                        | 1 Dokumen        | Menunjang.        |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                     | <b>Cakupan peserta KB aktif</b>                                                                                                                                                                            | <b>78.10%</b>    | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                       | <b>Persentase kualitas pelaksanaan program KB</b>                                                                                                                                                          | <b>26.00%</b>    | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                  |                                                                                                   |         | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                            | 1 Laporan        | Menunjang.        |



|     |                                                                          |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|     |                                                                          |                                                        |        | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                                 | <b>Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga</b>                                                                                                                                                      | <b>85%</b>    | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                          |                                                        |        | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                            | 1 Dokumen     | Menunjang.        |
|     |                                                                          |                                                        |        | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                                                 | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                                                                    | 64 Kampung KB | Menunjang.        |
| 2.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok pembangunan dalam pembangunan keluarga | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif | 84,27% | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                                                | <b>Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan ( BKB, BKR, BKL,PPPKS ).</b>                                                                                                                                                             | <b>74.74%</b> | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                          | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera            | 31,13% | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                 | <b>Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga</b>                                                                                                                                                      | <b>80%</b>    | <b>Menunjang.</b> |
|     |                                                                          |                                                        |        | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)        | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 1 Organisasi  | Menunjang.        |
|     |                                                                          |                                                        |        | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan     | Menunjang.        |
|     |                                                                          |                                                        |        | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)                                                             | Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                            | 10 Laporan    | Menunjang.        |
|     |                                                                          |                                                        |        | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                               | Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)                                                                              | 10 Laporan    | Menunjang.        |
|     |                                                                          |                                                        |        | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                                     | <b>Cakupan pengetahuan tentang pengolahan pangan</b>                                                                                                                                                                              | <b>75%</b>    | <b>Menunjang.</b> |



|     |                                                                                                                                 |                                     |           |                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                 |                                     |           |                                                                  | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                    | Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                    | 16 Laporan | Menunjang. |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           |                                                                  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)      | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          | 32 Unit    | Menunjang. |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           |                                                                  | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 Laporan  | Menunjang. |
| 3   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                           | Nilai evaluasi SAKIP PD             | BB (75)   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                                                                                     | Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik                                                                                                              | 100%       | Menunjang. |
|     |                                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD | B (77,78) |                                                                  |                                                                                                                                                                     | Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah                                                                                                     | 100%       | Menunjang. |
| 3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi pemerintahan | Nilai evaluasi SAKIP PD             | BB (75)   |                                                                  |                                                                                                                                                                     | Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko                                                                                                                            | 100%       | Menunjang. |
|     |                                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD | B (77,78) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                     | Persentase kebutuhan rutin penunjang kinerja PD yang terpenuhi.                                                                                                          | 100%       | Menunjang. |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                         | 2 Dokumen                                                                                                                                                                | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB                                                                                               | 100%                                                                                                                                                                     | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                   | 27 Orang                                                                                                                                                                 | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                     | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          | 5 Laporan                                                                                                                                                                | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Kebutuhan Administrasi Umum yang terselekkara                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                     | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                  | 8 Paket                                                                                                                                                                  | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                  | 6 Paket                                                                                                                                                                  | Menunjang. |            |
|     |                                                                                                                                 |                                     |           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                           | 1 Paket                                                                                                                                                                  | Menunjang. |            |



|  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                        |             |                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan                                                             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2 Dokumen   | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket     | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan  | Menunjang.        |
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah</b>                                            | <b>100%</b> | <b>Menunjang.</b> |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 12 Unit     | Menunjang.        |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>                              | <b>100%</b> | <b>Menunjang.</b> |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 10 Laporan  | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 10 Laporan  | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan  | Menunjang.        |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>                                                 | <b>100%</b> | <b>Menunjang.</b> |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit      | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit      | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit      | Menunjang.        |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 73 Unit     | Menunjang.        |



## G. Realisasi Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka mengelola potensi pendapatan daerah yang diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang terukur dan rasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah salah satu unit teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan termasuk ke dalam Satuan Kerja Daerah yang disertai tugas dalam penyelenggaraan urusan wajib di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dimana dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya tidak ada mengelola pendapatan sehingga pelaksanaan akuntabilitas keuangan terbatas pada pelaporandan evaluasi Belanja Daerah.

Untuk mendukung kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengelola dana Rp 21.614.220.000,00. Rincian belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.22 :

Tabel 3.22  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2                                                           | 3                | 4                | 5           |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,267,300,800.00 | 2,045,588,818.00 | 90%         |
|     |                                                             | 4,459,339,000.00 | 4,123,116,494.00 | 92%         |
|     |                                                             | 3,450,000.00     | 3,394,750.00     | 98%         |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja             | 3,450,000.00     | 3,394,750.00     | 98%         |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | 3,450,000.00     | 3,394,750.00     | 98%         |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | 4,459,339,000.00 | 4,123,116,494.00 | 92%         |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 4,459,339,000.00 | 4,123,116,494.00 | 92%         |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | 6,400,000.00     | 6,225,200.00     | 97%         |
|     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 6,400,000.00     | 6,225,200.00     | 97%         |



| No.      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Capaian (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                   | 3                     | 4                     | 5           |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>776,399,200.00</b> | <b>654,335,322.00</b> | <b>84%</b>  |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 23,173,000.00         | 8,173,000.00          | 35%         |
|          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 193,463,000.00        | 168,783,700.00        | 87%         |
|          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 56,240,200.00         | 56,240,200.00         | 100%        |
|          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan                                                             | 8,400,000.00          | 8,400,000.00          | 100%        |
|          | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 56,341,000.00         | 56,316,000.00         | 100%        |
|          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 438,782,000.00        | 356,422,422.00        | 81%         |
|          | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>                                                               | <b>141,464,200.00</b> | <b>138,577,400.00</b> | <b>98%</b>  |
|          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 141,464,200.00        | 138,577,400.00        | 98%         |
|          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>774,677,300.00</b> | <b>692,794,037.00</b> | <b>89%</b>  |
|          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6,960,000.00          | 6,204,500.00          | 89%         |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 153,637,000.00        | 144,874,837.00        | 94%         |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 614,080,300.00        | 541,714,700.00        | 88%         |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>568,360,100.00</b> | <b>553,656,859.00</b> | <b>97%</b>  |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 89,959,000.00         | 76,057,089.00         | 85%         |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 179,063,100.00        | 178,785,070.00        | 100%        |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 234,114,000.00        | 233,590,700.00        | 100%        |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.                                 | 65,224,000.00         | 65,224,000.00         | 100%        |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                    | <b>591,588,200.00</b> | <b>587,341,600.00</b> | <b>99%</b>  |
|          | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada</b>                                                                 | <b>92,321,200.00</b>  | <b>90,795,200.00</b>  | <b>98%</b>  |
|          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 92,321,200.00         | 90,795,200.00         | 98%         |
|          | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,</b>                                                        | <b>338,603,200.00</b> | <b>336,735,600.00</b> | <b>99%</b>  |
|          | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi        | 338,603,200.00        | 336,735,600.00        | 99%         |
|          | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>                                                          | <b>160,663,800.00</b> | <b>159,810,800.00</b> | <b>99%</b>  |
|          | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota      | 70,000,000.00         | 69,256,000.00         | 99%         |
|          | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                     | 90,663,800.00         | 90,554,800.00         | <b>100%</b> |



| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          | Capaian (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                       | 4                       | 5           |
| 3   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                       | <b>92,101,000.00</b>    | <b>90,429,000.00</b>    | <b>98%</b>  |
|     | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan                                                                                                                                     | 92,101,000.00           | 90,429,000.00           | 98%         |
|     | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota                                                                                           | 92,101,000.00           | 90,429,000.00           | 98%         |
| 4   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                             | <b>37,000,000.00</b>    | <b>36,650,000.00</b>    | <b>99%</b>  |
|     | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data                                                                                                                                | 37,000,000.00           | 36,650,000.00           | 99%         |
|     | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota                                                                                                                             | 37,000,000.00           | 36,650,000.00           | 99%         |
| 5   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                            | <b>296,892,700.00</b>   | <b>279,481,600.00</b>   | <b>94%</b>  |
|     | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,                                                                                                                                           | 296,892,700.00          | 279,481,600.00          | 94%         |
|     | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 296,892,700.00          | 279,481,600.00          | 94%         |
| 6   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                               | <b>514,404,200.00</b>   | <b>501,688,100.00</b>   | <b>98%</b>  |
|     | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah                                                                                                                              | 10,000,000.00           | 9,089,200.00            | 91%         |
|     | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                     | 10,000,000.00           | 9,089,200.00            | 91%         |
|     | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan                                                                                                                                   | 504,404,200.00          | 492,598,900.00          | 98%         |
|     | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                           | 279,600,000.00          | 279,600,000.00          | 100%        |
|     | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                               | 224,804,200.00          | 212,998,900.00          | 95%         |
| 7   | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                   | <b>5,673,352,100.00</b> | <b>5,646,951,654.00</b> | <b>100%</b> |
|     | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                            | 1,803,341,900.00        | 1,786,736,104.00        | 99%         |
|     | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                         | 165,807,900.00          | 163,730,754.00          | 99%         |
|     | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                              | 966,036,000.00          | 965,926,000.00          | 100%        |
|     | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)             | 286,710,000.00          | 286,610,000.00          | 100%        |
|     | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                             | 184,900,000.00          | 178,963,150.00          | 97%         |
|     | Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            | 199,888,000.00          | 191,506,200.00          | 96%         |
|     | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                             | <b>1,040,995,000.00</b> | <b>1,039,827,900.00</b> | <b>100%</b> |
|     | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              | 840,000,000.00          | 840,000,000.00          | 100%        |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 200,995,000.00          | 199,827,900.00          | 99%         |
|     | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</b>                                                      | <b>1,813,665,200.00</b> | <b>1,805,037,650.00</b> | <b>100%</b> |
|     | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.                                 | 80,700,000.00           | 73,631,450.00           | 91%         |
|     | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | 1,723,965,200.00        | 1,722,406,200.00        | 100%        |
|     | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | 9,000,000.00            | 9,000,000.00            | 100%        |





| No.                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | Capaian (%)   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                        | 4                        | 5             |
|                    | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                        | 1,015,350,000.00         | 1,015,350,000.00         | 100%          |
|                    | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                                  | 5,150,000.00             | 5,150,000.00             | 100%          |
|                    | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                                                 | 1,010,200,000.00         | 1,010,200,000.00         | 100%          |
| 8                  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                                                | <b>7,678,792,000.00</b>  | <b>7,572,137,200.00</b>  | <b>99%</b>    |
|                    | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                        | 19,692,000.00            | 17,868,600.00            | 91%           |
|                    | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)        | 19,692,000.00            | 17,868,600.00            | 91%           |
|                    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                            | 339,340,000.00           | 337,413,300.00           | 99%           |
|                    | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                   | 19,760,000.00            | 19,760,000.00            | 100%          |
|                    | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                    | 300,000,000.00           | 298,080,000.00           | 99%           |
|                    | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                              | 19,580,000.00            | 19,573,300.00            | 100%          |
|                    | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                 | 7,319,760,000.00         | 7,216,855,300.00         | 99%           |
|                    | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 263,760,000.00           | 160,855,300.00           | 61%           |
|                    | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)                                                             | 3,360,000,000.00         | 3,360,000,000.00         | 100%          |
|                    | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                               | 3,696,000,000.00         | 3,696,000,000.00         | 100%          |
| <b>J U M L A H</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>21,614,220,000.00</b> | <b>20,886,779,216.00</b> | <b>96.63%</b> |



## H. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |           |           | Anggaran          |                   |         | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                       | Target            | Realisasi | % Capaian | Anggaran          | Realisasi         | %       |                   |
|     |                                                                                                                                                       |                   |           |           | (Rp.)             | (Rp.)             | Capaian |                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                 | 4         | 5         | 6                 | 7                 | 8       | 9                 |
| A   | Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga;                                                              | 0.97              | 9.09      | 937.11%   | 1,017,581,900.00  | 993,902,200.00    | 97.67%  | 2.33%             |
| a.1 | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | Madya             | Madya     | 100%      | 221,422,200.00    | 217,874,200.00    | 98.40%  | 1.60%             |
|     |                                                                                                                                                       | 84%               | 85,71%    | 102.04%   | 338,603,200.00    | 336,735,600.00    | 99.45%  | 0.55%             |
|     |                                                                                                                                                       | 60%               | 61,72%    | 102.87%   | 160,663,800.00    | 159,810,800.00    | 99.47%  | 0.53%             |
| a.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | 0.0505            | 0.01802   | 165%      | 0                 | 0                 | #DIV/0! | #DIV/0!           |
|     |                                                                                                                                                       | Madya             | Madya     | 100%      | 296,892,700.00    | 279,481,600.00    | 94.14%  | 5.86%             |
|     |                                                                                                                                                       | 100%              | 100%      | 100%      | 0                 | 0                 | #DIV/0! | #DIV/0!           |
| B   | Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk                                                                                                            | 2.19              | 2.00      | 106.85%   | 13,866,548,300.00 | 13,720,776,954.00 | 98.95%  | 1.05%             |
| b.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | 18.8              | 7.57      | 159.73%   | 7,056,000,000.00  | 7,056,000,000.00  | 100.00% | 0.00%             |
|     |                                                                                                                                                       | 24.5              | 24.85     | 101.43    | 4,587,302,100.00  | 4,567,059,404.00  | 99.56%  | 0.44%             |
|     |                                                                                                                                                       | 9.5               | 9.22      | 102.95    | 80,700,000.00     | 73,631,450.00     | 91.24%  | 8.76%             |
| b.2 | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | 84%               | 84.27%    | 100.32%   | 319,580,000.00    | 317,653,300.00    | 99.40%  | 0.60%             |
|     |                                                                                                                                                       | 31.50%            | 31.13%    | 101.17%   | 1,822,966,200.00  | 1,706,432,800.00  | 93.61%  | 6.39%             |
| C   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas                                                                 | BB(70)            | BB (75)   | 107.14%   | 3,450,000.00      | 3,394,750.00      | 1.60%   | 1.60%             |
|     |                                                                                                                                                       | B(77.7)           | B (77,78) | 100.10%   | 6,726,639,800.00  | 6,168,705,312.00  | 8.29%   | 8.29%             |
| c.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | BB(70)            | BB (75)   | 107.14%   | 3,450,000.00      | 3,394,750.00      | 1.60%   | 1.60%             |
|     |                                                                                                                                                       | B(77.7)           | B (77,78) | 100.10%   | 6,726,639,800.00  | 6,168,705,312.00  | 8.29%   | 8.29%             |

Note: Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 0, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan , maka **efisien**



Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana mampu mengoptimalkan seluruh Sumber Daya yang dimiliki dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Upaya dan pengerahan segala sumber daya yang ada untuk mencapai **Tujuan** dan **Sasaran** seperti yang sudah diperjanjikan juga memperhatikan aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan koordinasi di lini lapangan.

Aspek efisiensi yang dilihat di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan *TFR* yang seharusnya turun ke lapangan, cukup dilakukan dengan virtual sehingga terjadi efisiensi/penghematan dari sisi waktu, tenaga, maupun penganggaran.

- Kegiatan dilakukan dengan berjenjang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pemilahan dan prioritasasi, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Faskes tidak perlu dilakukan secara langsung oleh DP3AKB Kabupaten Grobogan.

Aspek efisiensi yang dilihat dalam hal ini adalah penghematan biaya perjalanan dinas.

- Penghematan perjalanan dinas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan KB di lini lapangan. Perjalanan dinas diarahkan terutama untuk mendukung pengiriman Akseptor yang melakukan KB MOP dan MOW ke Fasilitas Kesehatan.

Aspek efisiensi dalam hal ini adalah penghematan pengeluaran perjalanan dinas kantor yang tidak perlu.

- Kegiatan pelayanan KB yang dilakukan secara bakti sosial adalah bentuk efisiensi. Pelayanan KB memerlukan persiapan tenaga, alat, bahan medis habis pakai, dan lain-lain.



Persiapan semua sumber daya tersebut membutuhkan jumlah yang hampir sama antara pelayanan KB dalam jumlah sedikit, maupun perorangan/rutin dengan pelayanan dalam jumlah besar. Dengan pengeralahan sumber daya yang hampir sama, maka pelayanan KB berbentuk bhakti sosial akan mendapatkan jumlah akseptor KB lebih banyak dibandingkan pelayanan perorangan/rutin.

- Penyebarluasan KIE yang mengarah pada penurunan *unmet need* dilakukan melalui media sosial seperti *facebook dan instagram*. Pesan-pesan KIE untuk mengajak masyarakat mengikuti program KB tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional seperti memasang umbul-umbul dan spanduk di jalan, tetapi sudah memanfaatkan teknologi informasi berbasis media sosial.

Aspek efisiensi dalam hal ini adalah penghematan biaya oleh sebab *upload* di media sosial jauh lebih murah bahkan tidak berbiaya sama sekali.

- Efisiensi belanja makan minum rapat.
- Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 3 tujuan, 5 sasaran dengan 14 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 937.11 % (kategori Sangat Tinggi)



- ✓ Sasaran 1.1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101.64 % (kategori Sangat Tinggi)
- ✓ Sasaran 1.2 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 121.67 % (kategori Sangat Tinggi).
- Tujuan 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106.85 % (kategori Sangat Tinggi)
  - ✓ Sasaran 2.1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 175.17 % (kategori Sangat Tinggi)
  - ✓ Sasaran 2.2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100.75 % (kategori Sangat Tinggi).
- Tujuan 3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103.62 % (kategori Sangat Tinggi)
  - ✓ Sasaran 3.1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103.62 % (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 21.614.220.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 20.886.779.216,00 (dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam belas



rupiah), dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 96.63% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3.37%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan, Februari 2025

  
**KEPALA DP3AKB  
KABUPATEN GROBOGAN**  
**INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680429 199001 2 001**





## LAMPIRAN :

### PERJANJIAN KINERJA ESELON II :

**PERNYATAAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDARTININGSIH, S.Sos, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SUMARNI, SH, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Grobogan,

Pihak Pertama,

**SRI SUMARNI, SH, M.M**

**INDARTININGSIH, S.Sos, M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19682429 199001 2 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Sasaran                                                                                       | Capaian Tahun 2023       | Target Tahun 2024        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                               | 4                        | 5                        |
| 1  | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                      | PUG                                                                                                             | 2.14%                    | 0.97%                    |
|    |                                                                                                                                                       | Capaian Level APE                                                                                               | Madya<br>(0.6375-0.7724) | Madya<br>(0.6375-0.7724) |
|    |                                                                                                                                                       | Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender | 77.14%                   | 84%                      |
|    |                                                                                                                                                       | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah                                                                        | 59.60%                   | 59.70%                   |
| 2  | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak                                                                                      | Prosentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                                     | 0.0520%                  | 0.0505%                  |
|    |                                                                                                                                                       | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA                                                                                 | Madya (798)              | Madya (618.10)           |
|    |                                                                                                                                                       | Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban               | 100%                     | 100%                     |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | TFR (Total Fertility Rate)                                                                                      | 2.21                     | 2.20                     |
|    |                                                                                                                                                       | ASFR 15 - 19                                                                                                    | 22.00                    | 18,80                    |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Peserta KB Aktip MKJP                                                                                | 24.10%                   | 24.50%                   |
|    |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                                                      | 9.58%                    | 9.50%                    |
| 4  | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif ( BKB,BKR,BKL dan UPPKS )                                | 81.41%                   | 84%                      |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                                                     | 32.49%                   | 31.50%                   |
| 5  | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                                                         | B (64.25)                | BB (70)                  |
|    |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                               | B (77.48)                | B (77.70)                |



| No.    | Program                                                      | Anggaran          |                      | Keterangan |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
|        |                                                              | Tahun 2023        | Perubahan Tahun 2024 |            |
| 1      | 2                                                            |                   | 3                    | 4          |
| 1      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten       | 6.162.695.250,00  | 6.730.089.800,00     | APBD       |
| 2      | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    | 462.015.050,00    | 591.588.200,00       | APBD       |
| 3      | Program Perlindungan Perempuan                               | 10.361.250,00     | -                    | APBD       |
| 4      | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | 225.000.050,00    | 92.101.000,00        | APBD       |
| 5      | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak              | 24.999.850,00     | 37.000.000,00        | APBD       |
| 6      | Program Pemenuhan Hak Anak ( PHA )                           | 166.189.450,00    | 296.892.700,00       | APBD       |
| 7      | Program Pengendalian Penduduk                                | 1.482.139.850,00  | 514.404.200,00       | APBD+APBN  |
| 8      | Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )                  | 6.242.186.250,00  | 5.673.352.100,00     | APBD+APBN  |
| 9      | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 7.776.540.000,00  | 7.678.792.000,00     | APBD+APBN  |
| JUMLAH |                                                              | 22.552.127.000,00 | 21.614.220.000,00    |            |

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH.M.M

Purwodadi,

2024

Pihak Pertama,

INDARTININGSIH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19682429 199001 2 001





## SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421025, Faksimile (0292) 421025  
Laman [dp3akb.grobogan.go.id](http://dp3akb.grobogan.go.id), Pos-el [dp3akb@grobogan.go.id](mailto:dp3akb@grobogan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 100.1.6.1/7/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- : b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- : b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- k. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 23 Januari 2024  
KEPALA DP3AKB  
KABUPATEN GROBOGAN



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

INDARTININGSIH, S.Sos.MM



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Nomor :  
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN GROBOGANTAHUN 2024**

| No | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja Utama                                                                                         | Satuan   | Formulasi/Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                     | Alasan                                                                                          | Penanggung Jawab                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan                 | PUG                                                                                                             | Skor     |                                                                                                                                                                                                 | Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.                                                 | Kabupaten dan Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB                       |
|    |                                                                  | Capaian Level APE                                                                                               | Predikat | Laporan hasil Tim Penilai                                                                                                                                                                       | Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.                                                 | Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB                                     |
|    |                                                                  | Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender | %        | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dibagi jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dikali seratus | Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.                                                 | Kabupaten dan Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB                       |
|    |                                                                  | Kontribusi perempuan di lembaga pemerintah                                                                      | %        | Jumlah perempuan yang menduduki di lembaga pemerintah dibagi jumlah seluruh yang menduduki lembaga pemerintah x 100%                                                                            | Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.                                                 | Kabupaten dan Bidang Pemberdayaan Perempuan / DP3AKB                     |
| 2  | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak | Prosentase perkawinan dibawah umur 19 tahun                                                                     | %        | Jumlah perkawinan di bawah umur 19 tahun dibagi jumlah seluruh perkawinan dikali seratus persen                                                                                                 | Untuk memberikan perlindungan atas hak – hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. | Kabupaten dan Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan DP3AKB |
|    |                                                                  | Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA                                                                                 | Skor     | Laporan hasil Tim Penilai                                                                                                                                                                       | Sebagai sarana untuk mewujudkan pemenuhan hak – hak anak.                                       | Kabupaten dan Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan DP3AKB |
|    |                                                                  | Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban               | %        | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sesuai standar dibagi dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dikali seratus persen                                                               | Wujud upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan                          | Kabupaten dan Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan DP3AKB |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*





| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Utama                                                          | Satuan | Formulasi/Rumus Perhitungan                                                                      | Alasan                                                                                                                                           | Penanggung Jawab                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana                                                                                              | TFR (Total Fertility Rate)                                                       | Angka  | Rata-rata kemampuan Wanita Usia Subur memiliki anak.<br>$TFR = 5 \times ASFR$                    | Sebagai indikator keberhasilan penurunan angka kelahiran.                                                                                        | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana KB |
|    |                                                                                                                                                       | ASFR 15 - 19                                                                     | Angka  | Kelahiran khusus pada kelompok umur wanita usia 15-19.                                           | Sebagai indikator untuk proyeksi jumlah kelahiran selama Usia Subur.                                                                             | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana KB |
|    |                                                                                                                                                       | Prosentase Peserta KB Aktif MKJP                                                 | %      | Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x 100 | MKJP memberikan jaminan penggunaan Alat Kontrasepsi lebih lama dan lebih efektif untuk pencegahan kehamilan.                                     | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana KB |
|    |                                                                                                                                                       | Unmet Need                                                                       | %      | Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi seluruh PUS x 100.          | Indikator ini dapat membantu dalam upaya pengendalian terhadap PUS yang tidak ber-KB tetapi berpotensi terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana KB |
| 4  | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga                                                                                          | Prosentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) | %      | Jumlah anggota Poktan Aktif dibagi seluruh anggota Poktan x 100                                  | Indikator ini menunjukkan tingkat kesadaran dalam pengembangan SDM Masyarakat.                                                                   | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                           |
|    |                                                                                                                                                       | Prosentase penurunan keluarga Pra Sejahtera                                      | %      | Jumlah Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera x 100            | Menunjukkan tingkat tahapan Keluarga sejahtera.                                                                                                  | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                           |
| 5  | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD                                                          | Skor   | Laporan Hasil Tim Penilai                                                                        | Untuk mengukur dan memperbaiki pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah                                                              | Sekretariat                                                                    |
|    |                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                | Skor   | Laporan Hasil Tim Penilai                                                                        | Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat                                                                                                         | Sekretariat                                                                    |





PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN

